



Analisis Pengawasan Pimpinan Pada UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan (PTPHP) Provinsi Bengkulu

Bambang Sutikno

Department of Administration Public, STIA Bengkulu

Email: bambangstia01@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [29 Desember 2021]

Revised [08 Januari 2022]

Accepted [20 Januari 2022]

KEYWORDS

Pengawasan,
 Perlindungan,
 Tanaman,

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendapatkan data, serta mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pengawasan pimpinan pada UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (PTPHP) Provinsi Bengkulu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu peneliti membuat gambaran tentang keadaan secara objektif mengenai pelaksanaan Pengawasan Pimpinan pada UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (PTPHP) Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Kepala UPTD. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari 7 orang informan pegawai dan 2 orang informan masyarakat. Berdasarkan aspek dan hasil penelitian maka dapat diketahui gambaran mengenai pelaksanaannya. Aspek Pertama yaitu pengetahuan pegawai UPTD PTPHP Provinsi Bengkulu mengenai standar kerja masih kurang, tidak menggunakan media lain seperti spanduk atau roll baner dan lainnya. Aspek Kedua yaitu kemampuan kerja pegawai UPTD PTPHP Provinsi Bengkulu dalam melayani masyarakat atau petani belum maksimal, karena masih adanya keluhan dari masyarakat atau petani bahwa pegawai UPTD PTPHP Provinsi Bengkulu sering berpergian pada saat jam kerja masih berlangsung dan pada saat petani ingin melakukan pelayanan terkait budidaya tanamannya. Aspek Ketiga yaitu tindakan perbaikan yang diambil seperti sanksi melalui teguran belum mampu untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi.

ABSTRACT

This study aims to identify, collect data and describe how leadership monitoring at UPTD is carried out for the protection of food crops and plantations (PTPHP) in Bengkulu province. In this study, the researchers used qualitative analysis techniques with descriptive methods, i.e. the researchers objectively described the situation related to the performance of supervisory leadership. at UPTD for Plant Protection and Cultivation Food (PTPHP) of Bengkulu Province conducted by the head of UPTD. While the data collection techniques in this study were interviews, observations and documentation. The informants for this study were 9 people, including 7 staff informants and 2 community informants. Based on the research aspects and results, one can see an overview of the performance. The first aspect is that the knowledge of UPTD PTPHP staff of Bengkulu Province about labor standards is still lacking, they do not use other means such as banners or banners and other means. The second aspect is that the working capacity of UPTD PTPHP staff in Bengkulu province to serve the community or farmers has not been maximized, due to complaints from the community or farmers that UPTD staff PTPHP of Bengkulu Province often travels on business during its work. hours and when farmers want. to provide services related to their culture. . The third aspect is that the corrective measures taken such as punishment by reprimand have not yet been able to reduce the deviations that occur.

PENDAHULUAN

Tujuan dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau tidak tergantung dari faktor manusia yang berperan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan. Untuk memperoleh kemajuan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pimpinan perlu mengerakkan serta memantau pegawainya agar dapat mengembangkan seluruh kemampuan yang dimilikinya melalui suatu pengawasan (Irfan Fahmi, 2017:138).

Banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh aparat pemerintah, maka pengawasan perlu dilakukan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh institusi yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri. Dalam upaya menerapkan dan memantapkan pelaksanaan pengawasan pimpinan kepada pegawai yang ada dalam organisasi, dibutuhkan manajemen yang baik agar pengawasan dapat berjalan dengan lancar sehingga pegawai dapat melayani masyarakat dengan maksimal. Untuk mengemban tugas serta tanggung jawabnya, pimpinan sebaiknya dapat memberikan nilai kontribusi dalam pelaksanaan tugas pegawai dengan sebaik mungkin. Dengan demikian diharapkan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.

Dalam era otonomi daerah, pengawasan dari pimpinan masih mengalami banyak permasalahan, baik dari segi kelembagaan aparat pengawasannya yang belum dapat bekerja secara sinergis, efisien dan efektif, maupun alat-alat pengawasan lainnya berupa standar-standar sebagai dasar pelaksanaan dan sistem pengendalian internal yang belum dapat berjalan sesuai dengan apa yang di tetapkan pada peraturan perundang-undangan (academia.edu, 2017). Seperti yang di temui dilapangan dapat di lihat dari beberapa fenomena sehubungan dengan pengawasan pimpinan diantaranya, pimpinan jarang menegur pegawai yang meninggalkan kantor disaat jam kerja, melainkan pimpinan hanya menanyakan berapa jumlah pegawai yang hadir perbidangnya, lalu pimpinan jarang menindaki pegawai yang telat masuk kantor dan yang jarang mengikuti apel pagi. Dengan terjadinya hal tersebut, sudah dapat membuktikan bahwa pengawasan kerja pegawai masih sangat kurang (media.neliti.com, 2017).

Dinas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Bengkulu yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pertanian. OPD di Povinsi Bengkulu dibentuk seiring terbitnya Undang-undang nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara nomor 2828) dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan kewenangannya Dinas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (PTPHP) yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota. Pada pasal 4 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 66 Tahun 2017, UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi Dinas dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada dibawah kewenangan Dinas.

UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di pimpin oleh seorang Kepala UPTD. Dalam Pasal 16 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 66 Tahun 2017 Kepala UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi yaitu melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pertanian sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura dan sub sektor perkebunan, melaksanakan pengkajian dan analisis teknis operasional di bidang pertanian sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura dan sub sektor perkebunan, melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi di bidang pertanian sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura dan sub sektor perkebunan, serta melaksanakan administrasi masing-masing UPTD.

Pengawasan merupakan fungsi yang dilakukan oleh pimpinan dari tingkat tertinggi sampai terendah dengan menggunakan fungsi manajemen. Dalam hal ini, pemimpin mempunyai wewenang untuk dapat mengawasi bawahannya dalam melaksanakan tugas serta bertanggung jawab atas pekerjaannya sehingga terbentuk suatu kejasama antara pimpinan dan bawahannya. Dengan adanya pengawasan kerja yang dilakukan pimpinan, maka pegawai tersebut harus bisa menunjukkan kualitas dan profesionalisme kerja pegawai tersebut (Irfan Fahmi, 2017:143).

Setiap staf melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan urusannya masing-masing, karena berhasil atau tidaknya suatu tugas Kepala UPTD akan dipengaruhi oleh kemampuan pada masing-masing staf dalam menjalankan fungsinya. Sehingga, pekerjaan yang dilaksanakan oleh staf UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Pada dasarnya pengawasan berarti pengamatan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut (Irfan Fahmi, 2017:139). Dalam penyelenggaraan yang telah dilakukan UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu ada beberapa hal yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini, terlihat dari masih adanya keluhan dari kelompok tani/petani pada saat kelompok tani/petani ingin memberikan pengaduan tentang tanamannya.

Berdasarkan hasil pra penelitian kepada pegawai UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, diketahui bahwa adanya tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai. Seperti misalnya, adanya pegawai yang keluar kantor pada saat jam kerja, padahal ada kelompok tani yang ingin memberikan pengaduan tentang tanamannya yang terkena penyakit atau hama. Hal ini, menunjukkan bahwa pegawai pada UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu belum melaksanakan pekerjaannya sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan. Maka dari itu, pengawasan pimpinan harus dilakukan, baik itu pengawasan secara langsung maupun pengawasan tidak langsung. Hal itu dilakukan agar tujuan dari program kerja UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu dapat tercapai serta program kerja tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Terjadinya permasalahan tersebut merupakan contoh kerja pegawai UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu yang belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidakhadiran pegawai sewaktu kelompok tani ataupun petani ingin memberikan pengaduan. Jika dikaitkan dengan pengawasan pimpinan pada UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, maka terlihat jelas bahwa belum adanya pengawasan pimpinan yang baik. Hal tersebut dilihat dari pegawai yang tidak ada di kantor pada saat jam kantor sedang berlangsung.

Pengawasan dilakukan dalam usaha menjamin kegiatan agar terlaksana sesuai dengan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar yang telah ditetapkan (Irfan Fahmi, 2017:139).

Adapun standar kerja pegawai tersebut yaitu menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT, melakukan eksplorasi agens hayati atau pestisida nabati, melakukan perlakuan di laboratorium/ rumah kaca dalam rangka pelaksanaan perlakuan terhadap OPT/OPTK, menjadi fasilitator kelompok tani dalam pelaksanaan diskusi hasil pengamatan OPT dan/atau faktor iklim, melakukan bimbingan penerapan PHT kelompok tani, menyiapkan bahan penyusunan manual/jiklak/jiknis perlindungan/karantina tumbuhan, melakukan konsenasi agens hayati, menganalisis/mengkaji resiko OPT/OPTK dan atau agens hayati, membuat koleksi OPT/OPTK secara kompleks, memelihara dan mengamankan koleksi OPT/OPTK dan media pembawa OPT/OPTK, melakukan pengamatan/pemeriksaan gejala serangan OPT/OPTK, melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK, melakukan perbanyak agens hayati (patogen, parasitoid, predator), melakukan pengolahan data hasil pengamatan, peramalan, pengendalian/ tindakan karantina terhadap OPT/OPTK, memandu kelompok tani melakukan identifikasi masalah OPT (varietas, jenis OPT, luas dan intensitas serangan), serta melakukan kajian dampak PHT terhadap pola budidaya tanaman di tingkat kelompok tani.

Seorang pegawai sudah sepatutnya dan seharusnya selalu mematuhi peraturan atau ketentuan yang ada dalam organisasi. Sama halnya dengan manusia lainnya, pegawai tetaplah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kadang kala pegawai melakukan kesalahan dan tindakan menyimpang dari peraturan. Misalnya masuk kerja terlambat, pulang kantor sebelum waktunya tanpa keterangan yang jelas, meninggalkan pekerjaan sesuka hatinya, tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, keluar dari kantor tanpa izin, bahkan saat jam kantor keluyuran tanpa keperluan yang jelas diluar kantor dengan masih memakai pakaian dinas. Hal itulah yang akan menghambat pencapaian tujuan dan menimbulkan efek negatif bagi organisasi.

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dalam hal ini kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (PTPHP) Provinsi Bengkulu dirasakan belum efektif. Hal itu dapat dilihat dari pelaksanaan pengawasan pimpinan terhadap pegawai belum maksimal yang ditandai dengan masih banyaknya pegawai yang tidak ada di kantor pada saat jam kerja masih berlangsung. Pengawasan memiliki peran penting terutama dalam memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Disamping itu, pengawasan juga memiliki peran dalam membantu seorang pimpinan suatu organisasi dalam mengawal dan mewujudkan keinginan visi dan misi organisasi, dan tidak terkecuali telah menempatkan seorang pimpinan sebagai pihak yang memiliki wewenang sentral di suatu organisasi (Irfan Fahmi, 2017:140-141).

LANDASAN TEORI

Pengawasan

Menurut T. Hani Handoko dalam Fahmi (2017:139), pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Meskipun rencana yang mantap telah ada, sudah diatur dan digerakkan, belumlah terjamin bahwa tujuan akan tercapai secara otomatis. Disini diperlukan pula adanya pengawasan (Controlling) untuk mengawasi segala sesuatunya berjalan menurut rencana atau tidak. Pengawasan ialah mengamati kegiatan secara konstan, apakah segala aktivitas manajemen berjalan lurus atau menyimpang. Pengawasan berusaha mempertahankan agar seluruh kegiatan berjalan lurus di atas garis yang telah ditetapkan. Dan jika ditemukan penyimpangan, maka diluruskanlah sedini mungkin, supaya penyimpangan itu tidak berkepanjangan yang menimbulkan bencana yang lebih besar (Uliana, 2016).

Pengawasan menurut Hadibroto dalam Fahmi (2017:139), adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi atau kegiatan dengan tujuan agar organisasi atau kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan adalah aktivitas yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sedangkan menurut Brantas dalam Fahmi (2017:139), pengawasan dapat

diartikan sebagai suatu proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu fungsi dalam manajemen yang sangat penting, pengawasan merupakan salah satu indikator penting yang akan menentukan terlaksananya suatu program atau kegiatan berdasarkan perencanaan. Dalam pengawasan juga terdapat suatu tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang sangat penting dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan atau program. Output dari pengawasan adalah suatu perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi.

Beberapa tujuan pengawasan kantor (Uliana 2016), adalah:

1. Meningkatkan kinerja organisasi secara kontinue, karena kondisi persaingan usaha yang semakin tinggi menuntut organisasi untuk setiap saat mengawasikinerjanya
2. Meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi organisasi dengan menghilangkan pekerja yang tidak perlu atau mengurangi penyalahgunaan alat atau bahan
3. Menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil akurat yang dicapai, dan dapat dipakai sebagai dasar pemberi kompensasi bagi seorang pegawai
4. Mengkoordinasikan beberapa elemen tugas atau program yang dijalankan
5. Meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yaitu proses kegiatan untuk mengetahui apa yang telah dikerjakan, yang berkaitan dengan evaluasi prestasi kerja, jika perlu melakukan tindakan perbaikan atau tindak lanjut berdasarkan standar atau tolok ukur yang ditetapkan sebelumnya, agar supaya prestasi kerja tercapai sesuai dengan rencana. Fungsi-fungsi fundamental manajemen tersebut juga merupakan sistem. (Uliana 2016).

Pengawasan bukan mencari-cari kesalahan terhadap orangnya, tetapi pengawasan berupaya untuk menemukan apa yang tidak benar dalam pencapaian hasil kerja dari pelaksanaan pekerjaan pegawai dan organisasi secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu maka dalam implementasi fungsi pengawasan tersebut harus ada pedoman berupa asas atau prinsip yang dijadikan pegangan oleh pengawas dan pihak yang terkena pengawasan.

Pola Pengawasan

Teknik pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam pengawasan untuk mengetahui apakah suatu tindakan telah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Pada dasarnya, Teknik pengawasan dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua teknik yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, yaitu:

- a. Pengawasan Langsung. Yang dimaksud dengan pengawasan langsung yaitu apabila pimpinan organisasi melakukan langsung sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.
- b. Pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang tidak langsung dilakukan oleh pimpinan tetapi melalui perantara seperti laporan. Laporan tersebut dapat berbentuk secara lisan maupun tertulis.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik pengawasan adalah suatu cara yang dipakai dalam pengawasan untuk memastikan apakah kegiatan-kegiatan yang ada telah sesuai dengan yang direncanakan. Dalam penelitian ini digunakan kombinasi teknik pengawasan menurut Siagian dan juga Bohari, yaitu: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, serta pengawasan preventif dan pengawasan represif dalam pengawasan pimpinan pada UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.

Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat (Waskat) pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen lainnya. Waskat merupakan proses pengawasan yang dilakukan langsung oleh pimpinan organisasi (lembaga). Oleh karena itu, waskat memiliki sifat sangat dominan dan sangat menentukan mengingat kedudukan pimpinan yang menentukan jalannya mekanisme birokrasi organisasi.

Pengertian Waskat itu sendiri sebenarnya tidak jauh beda dengan pengertian pengawasan secara umum, walaupun para ahli mendefinisikan waskat secara khusus. Victor M. Situmorang dan Jusuf Jahir (1994:72) mengemukakan pengertian Waskat sebagai proses pemantauan, pemeriksaan, evaluasi yang dilakukan secara efektif dan efisien oleh pimpinan atau atasan organisasi kerja terhadap seluruh sumber kerja untuk mengetahui berbagai kekurangan dan kelemahan, supaya dapat diperbaiki atau diusulkan oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi demi tercapainya tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Tujuan Pengawasan Melekat.

Tujuan dilaksanakannya Waskat sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 yaitu terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, kebijaksanaan, rencana dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang dilakukan oleh atasan langsung. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: "Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan". Tujuan pengawasan pula bisa dikatakan sebagai upaya membandingkan kondisi yang seharusnya dengan kondisi kenyataannya yang ada, sehingga nantinya diikuti dengan tindakan pembenaran atau pengarahan sampai akhirnya tindakan organisasi sesuai dengan apa yang seharusnya.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode Yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Berikut adalah tabel desain penelitian yang dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 Desain Penelitian

No.	Desain	Uraian
1.	Pendekatan Penelitian	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.
2.	Fokus Penelitian	Pengawasan Pimpinan dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Kepala UPTD PTPHP.
3.	Aspek Penelitian	Proses Pengawasan yaitu menetapkan alat ukur/standar pengawasan, menilai hasil kerja pegawai, dan melakukan tindakan perbaikan atas penyimpangan kerja pegawai.
4.	Tempat Penelitian	Penelitian ini dilakukan di UPTD PTPHP Provinsi Bengkulu.
5.	Teknik Pengumpulan Data	Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.
6.	Teknik Pemilihan Informan	Dalam penelitian ini informan yang diteliti yaitu informan yang berkaitan langsung dengan pengawasan Pimpinan pada UPTD PTPHP yaitu Kepala UPTD, Kasubag TU, Kasi Pelayanan Teknis, Kasi Lab, Staff UPTD dan masyarakat dalam hal ini petani/kelompok tani.
7.	Teknik Analisa Data	Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2019.

Pada tabel 1 diatas menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, fokus dan aspek penelitian, tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan dan teknik analisa data.

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam V. Wiratna Sujarweni (2014:19), Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Penelitian kualitatif dimana penelitian deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan peristiwa sebagaimana adanya. Sehingga, bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

Fokus Penelitian

UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (PTPHP) Provinsi Bengkulu adalah keseluruhan rangkaian, tindakan, kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan untuk mengawasi dan mengendalikan bawahan serta organisasi atau unit organisasinya secara terus menerus demi terciptanya tata tertib kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan dan tercapainya hasil atau tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan program atau rencana dan ketentuan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini didapatkan berdasarkan data-data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui proses teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi secara langsung dan melakukan dokumentasi yang mendukung penelitian. Hasil yang didapat ini merupakan penjelasan yang menyajikan mengenai keterangan-keterangan yang ditemukan dilapangan selama penelitian. Data-data yang berhasil peneliti kumpulkan tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan yang relevan mengenai pengawasan pimpinan pada UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala UPTD, Kasubag TU, Kasi Pelayanan Teknis, Kasi Laboratorium, Staf Laboratorium, serta Staf Pelayanan Teknis, dapat kita lihat terdapat perbedaan jawaban yang diberikan masing-masing pegawai. Hal ini berarti, pegawai pada UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu belum semuanya mengerti apa itu standar kerja pegawai dan apa saja standar kerja yang harus mereka lakukan selama mereka bekerja di UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.

Publikasi standar kerja pegawai UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu masih belum optimal, karena publikasi mengenai standar kerja pegawai hanya melalui satu buku pedoman saja, tidak dibagikan kepada seluruh pegawai UPTD, dan juga tidak diketik menggunakan media lain seperti spanduk atau roll baner agar semua pegawai di UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu mengetahui dan memahami standar kerja pegawai tersebut.

Pembahasan

Standar kerja merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur hasil pekerjaan. Standar kerja tersebut harus ditetapkan dahulu sebelum melaksanakan pekerjaannya, dan bawahan harus mengetahui betul standar kerja yang digunakan atasan untuk menilai pekerjaannya. Untuk mencapai maksud yang sama yaitu bawahan dapat memahami standar yang digunakan atasannya, maka standar dapat dikembangkan atas suatu dasar bersama. Dengan kata lain atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar dari hasil pekerjaan bawahan tersebut.

Terlihat bahwa beberapa pegawai UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu masih sangat kurang dalam pengetahuan mengenai standar kerja yang digunakan. Hal itu dikarenakan kurangnya publikasi mengenai standar kerja, dilihat dari buku standarkerja yang digunakan hanya dimiliki oleh satu orang pegawai UPTD PTPHP yaitu Staf Laboratorium Ibu KY. Selain itu publikasi melalui media lain seperti spanduk atau roll banner dan sebagainya juga tidak ada. Dalam hal ini pemahaman pegawai UPTD PTPHP mengenai standar kerja masih sangat kurang, sehingga mereka tidak bekerja sesuai dengan standar kerja yang telah ditentukan.

pengetahuan pegawai mengenai standar kerja masih sangat kurang karena publikasi mengenai standar kerjanya juga kurang, kemampuan pegawai dalam melayani masyarakat atau petani masih kurang karena masyarakat atau petani masih mengeluhkan adanya pegawai yang keluar kantor saat jam kerja masih berlangsung dan ini berarti dapat menghambat pelayanan terhadap masyarakat atau petani, serta tindakan perbaikan yang diambil masih sangat kurang karena hanya menegur dan membiarkan saja pegawai yang pergi saat jam kerja berlangsung, sedangkan motivasikerja seperti memberikan motor atau mobil dinas baru belum mampu meminimalisir penyimpangan yang terjadi di UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan pengetahuan pegawai UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu mengenai standar kerja masih kurang, karena publikasi mengenai standar kerja yang hanya dimiliki satu orang pegawai saja dan tidak menggunakan media lain seperti spanduk atau roll baner dan lainnya. Dimana, bertujuan untuk memudahkan pegawai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu dalam memahami standar kerja yang harus dilakukan. penelitian pegawai UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu belum mampu melakukan pelayanan dengan baik. Karena masih adanya keluhan dari masyarakat atau petani bahwa pegawai UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu sering berpergian pada saat jam kerja masih berlangsung dan pada saat petani ingin melakukan pelayanan terkait budidaya tanamannya yang terserang hama dan penyakit. Hal ini berarti pegawai UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura



dan Perkebunan Provinsi Bengkulu belum maksimal dalam menjalankan TUPOKSI yang telah ditetapkan karena berdasarkan TUPOKSI UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu yaitu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat terkait budidaya tanaman perkebunan dengan maksud dan tujuan untuk melindungi tanaman dan produksinya dari serangan organisme pengganggu tanaman sehingga nilai kerugian dapat diminimalisirkan

Saran

Agar standar kerja seperti menggunakan spanduk atau roll banner dan lainnya agar dapat diketahui dan dimengerti oleh semua pegawai UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. Pegawai UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu hendaknya tidak berpergian keluar kantor pada saat jam kerja masih berlangsung karena dapat menghambat proses pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau petani. Perlu adanya sanksi tegas agar dapat meminimalisir penyimpangan, serta perlu adanya motivasi kerja yang lebih lagi agar meningkatkan kedisiplinan pegawai UPTD. Terakhir, pengawasan oleh Kepala UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu harus ditingkatkan lagi agar pegawai tidak seenaknya saja keluar kantor disaat jam kerja masih berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Emzir, (2012). Analisis Data (Metodologi Penelitian Kualitatif). Jakarta Rajawali Pers.
- Fahmi, Irfan. (2017). Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
- Handoko, T. Hani. (2009). Manajemen Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Hardiansyah, (2011). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. Jogjakarta: Gava Media.
- Manullang, M. (2004). Dasar-dasar manajemen. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Siagian, P. Sondang. (2014). Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). Metodologi penelitian. Yogyakarta: Pustaka. Baru Press.
- Yahya, Yohanes. (2006). Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aryani Febria, (2012). Pengaruh pengawasan kantor terhadap kedisiplinan pegawai. <https://id.scribd.com/doc/252108331/Jurnal-Pengaruh-Pengawasan-Kantor-Terhadap-Kedisiplinan-Pegawai> . Diakses pada tanggal 24 November 2018 pukul 20.10 WIB
- Dian Pramana Putra, (2013). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengalokasian Dana Desa (ADD) [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/11/e%20JURNAL%20PENGAWASAN%20BPD%20DALAM%20PENGELOLAAN%20ADD%20\(11-14-13-11-37-36\).doc](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/11/e%20JURNAL%20PENGAWASAN%20BPD%20DALAM%20PENGELOLAAN%20ADD%20(11-14-13-11-37-36).doc). Diakses pada tanggal 24 November 2018 pukul 20.30 WIB.
- Uliana Ria Sembiring, (2016). Sistem pengawasan pemerintahan daerah. <https://anzdoc.com/teknofisiensi-jurnal-ilmiah-kopri-kopertis-wilayah-iv-vol.html>. Diakses pada tanggal 24 November 2018 pukul 20.45 WIB.

Efektivitas Penyuluhan Kesehatan Dalam Peningkatan Kesadaran Kesehatan Lingkungan Pada Wilayah Kerja PUSTU Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang

Mulyadi

Department of Administration Public, STIA Bengkulu

Email: mulyadiyurid@yahoo.com

ARTICLE HISTORY

Received [29 Desember 2021]

Revised [08 Januari 2022]

Accepted [20 Januari 2022]

KEYWORDS

Penyuluhan kesehatan,
kesadaran kesehatan
lingkungan

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Tujuan Dari Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan serta menganalisis efektivitas penyuluh kesehatan dalam peningkatan kesadaran kesehatan lingkungan pada wilayah kerja PUSTU Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang. Adapun Judul Penelitian ini adalah "Efektivitas Penyuluhan Kesehatan Dalam Peningkatan Kesadaran Kesehatan Lingkungan Pada Wilayah Kerja Pustu Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang.". Metode yang digunakan dalam penelitian ini tergolong dalam tipe penelitian Deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara. Sampel dalam penelitian ini adalah tenaga penyuluh kesehatan dari pustu dan sampel dari masyarakat yang ditetapkan secara simple random sampling (sampel acak sederhana), dimana sampel yang di ambil adalah sebanyak 10% dari seluruh Kepala keluarga yang ada yaitu sebanyak 4 KK yang berasal desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyuluh kesehatan dalam peningkatan kesadaran kesehatan lingkungan pada wilayah kerja pustu Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang. Belum efektif, yang di indikasikan dengan belum meningkatkannya kesadaran masyarakat mengenai arti penting kesehatan lingkungan. Kondisi tersebut terlihat dari : masih banyaknya masyarakat yang belum menyadari betapa penting nya kesehatan lingkungan, masyarakat masih kurang kesadaran membuang sampah tidak pada tempatnya, seringnya membuang kotoran dibelakang rumah dan mengubur tinja, masyarakat sering membiarkan air tergenang, pakaian bergantung dan membuang sampah sembarangan, masih banyak masyarakat yang belum membuat saluran air limbah secara sehat, sebagian masyarakat masih membuang sampah di sembarang tempat, dan masih ada masyarakat yang membuang kotoran di sungai, dan masih banyak masyarakat yang belum memiliki jamban keluarga maupun WC yang layak.

ABSTRACT

The aim of this study was to describe, explain and analyze the effectiveness of health educators in raising awareness about environmental health in the work area of PUSTU Tanjung in Pondok Kubang district. The title of this study is "Efficacy of health extension in raising environmental health awareness in the Pustu Tanjung work area in Pondok Kubang district". The method used in this study belongs to the type of qualitative descriptive research. Data for this study were collected through observation and interview techniques. The sample for this study consisted of pustu health educators and a community sample determined by simple random sampling, where the sample taken was representative of 10% of the total number of existing heads of households, up to family in Tanjung Dalam village Pondok Kubang District. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of health educators aims to increase awareness of environmental health at Tanjung Pustu work area in Pondok Kubang district. Ineffective, indicated by the lack of public awareness of the importance of environmental health. It can be seen that this is because many people are still not aware of the importance of environmental health, people are not aware of improper waste treatment, often throw garbage behind the house and bury their feces, ordinary people let water stagnate, dry clothes and garbage, there are still many people who do not handle their waste in a healthy way, some people still throw garbage everywhere, there are still people who throw garbage in the river, and there are still many people who do not have a home Hygiene, reasonable family toilet. .

PENDAHULUAN

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, manajemen, program, atau kegiatan. Karena output yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik seperti puskesmas lebih banyak bersifat output tidak berwujud (intangible) berupa hasil cakupan program jasa pelayanan kesehatan yang tidak mudah untuk dikualifikasikan, maka pengukuran efektivitas tersebut sering mengalami kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas juga karena pencapaian hasil akhir (outcome) sering tidak bisa diketahui dalam waktu pendek, tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (judgment) seperti tingkat kepuasan pelanggan dan masyarakat.

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dari mutu kehidupan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia seutuhnya. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas- luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal yang diwujudkan antara lain dengan membangun Puskesmas di seluruh

Indonesia. (Pasal 3 Undang-Undang Kesehatan No.23 tahun 1992) tentang pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat banyak hal yang perlu dilakukan, salah satu diantaranya dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkannya kesehatan perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Pelayanan kesehatan yang langsung menyentuh pada lapisan masyarakat yang paling bawah dan sangat diperlukan oleh masyarakat adalah sangat penting hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas pembantu akan memberikan perlindungan kesehatan kepada warga masyarakat khususnya bagi warga kurang mampu. Puskesmas diharapkan mampu memberikan jaminan bagi warga masyarakat sekitarnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan.

Puskesmas pembantu adalah Suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Dalam pelaksanaan fungsional puskesmas dibutuhkan efektivitas kinerja pegawai yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan Suatu Puskesmas dapat beroperasi apabila memiliki tenaga kerja yang terdiri dari Kepala puskesmas, perawat, bidan desa, bidan PTT. Mutu pelayanan kesehatan yang baik tergantung pada efektivitas kinerja pegawai dalam suatu puskesmas. Hal ini dapat terlihat dari tingkat kesehatan masyarakat setempat dan kelancaran program-program yang dilaksanakan puskesmas. Setiap pegawai puskesmas harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan puskesmas.

Salah satu puskesmas pembantu (pustu) adalah yang terletak di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang. Keberadaan pustu tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa Tanjung Dalam dan Sekitarnya. Dengan harapan bisa meningkatkan kesehatan di masyarakat sehingga dapat mengurangi jumlah yang sakit di setiap tahun nya. Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang terdapat sekitar 63 kepala keluarga, sedangkan sarana kesehatan yang ada belum memadai. Terdiri dari sumur galian, WC, pembuangan air limbah dan tempat - tempat umum (TTU).

LANDASAN TEORI

Efektivitas

Siagian (1994:151) memberi pengertian Efektivitas kerja sebagai penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah di tetapkan, artinya apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung bilamana tugas itu diselesaikan atau tidak terutama menjawab pertanyaan bilamana cara melaksanakan dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Efektivitas organisasi memusatkan perhatian terutama pada gejala gejala dalam lingkup organisasi. Efektivitas selalu di ukur berdasarkan prestasi, produktifitas laba dan seterusnya. Agar sebuah organisasi dapat berjalan efektif diperlukan sasaran sebagai tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Dalam penelitian ini, efektivitas penyuluhan kesehatan dalam kesadaran kesehatan lingkungan mengacu pada hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh penyuluh kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan lingkungan pada wilayah kerja PUSTU Desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang.

Puskesmas Pembantu (PUSTU)

Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan. dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Jumlah puskesmas pembantu (pustu) menurut kondisi adalah informasi mengenai jumlah puskesmas pembantu (pustu) yang dimiliki oleh puskesmas yang bersangkutan yang dirinci menurut kondisi fisik bangunannya.

Untuk melancarkan pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, puskesmas pembantu merupakan bagian utama dalam jaringan pelayanan puskesmas, dalam jaringan pelayanan Puskesmas di setiap wilayah Desa pustu merupakan bagian integral dari puskesmas, dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah. di Kabupaten masalah keterbatasan penduduk miskin untuk menjangkau pelayanan kesehatan juga sangat terasa. Dengan berbagai hambatan, letak geografis dan sarana transportasi seharusnya pustu menjadi pilihan masyarakat untuk

dimanfaatkan karena merupakan satu-satunya pelayanan kesehatan. yang bisa di jangkau oleh masyarakat. Namun kenyataannya pemanfaatan pustumasih sangat rendah.

Penyuluhan Kesehatan

Penyuluhan menurut Gondoyoewono (1993:699) adalah suatu penerangan yang menekankan pada suatu objek tertentu dan hasil yang diharapkan adalah suatu perubahan perilaku individu atau sekelompok orang. Penyuluhan merupakan suatu usaha menyebarluaskan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik dan berminat untuk melaksanakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Penyuluhan juga merupakan suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada masyarakat, memberi pengetahuan, informasi-informasi, dan kemampuan-kemampuan agar dapat membentuk sikap dan berperilaku hidup menurut apa yang seharusnya. Hakekatnya penyuluhan merupakan suatu kegiatan nonformal dalam rangka mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan.

Penekanan konsep penyuluhan kesehatan lebih pada upaya mengubahperilaku sasaran agar berperilaku sehat terutama pada aspek (*kognitif*) pengetahuan dan pemahaman sasaran, sehingga pengetahuan sasaran penyuluhan telah sesuai dengan yang diharapkan oleh penyuluh kesehatan maka penyuluhan berikutnya akan dijalankan sesuai dengan program yang telah direncanakan (Maulana, 2009:137).

Penyuluhan kesehatan adalah penambahan pengetahuan dan kemampuanseseorang melalui tehnik praktek belajar atau instruksi dengan tujuan mengubah atau mempengaruhi perilaku manusia secara individu, kelompok maupun masyarakat untuk dapat lebih mandiri dalam mencapai tujuan hidup sehat. Penyuluhan kesehatan adalah gabungan berbagai kegiatan dan kesempatan yang berlandaskan prinsip-prinsip belajar untuk mencapai suatu keadaan, dimanaindividu, keluarga, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan ingin hidup sehat, tahu bagaimana caranya dan melakukan apa yang bisa dilakukan, secara perseorangan maupun secara kelompok dengan meminta pertolongan

Penyuluhan kesehatan mencakup individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Penyuluhan kesehatan pada individu dapat dilakukan di rumah sakit, klinik, puskesmas, posyandu, keluarga binaan dan masyarakat binaan. Penyuluhan kesehatan pada keluarga diutamakan pada keluarga resiko tinggi, seperti keluarga yang menderita penyakit menular, keluarga dengan sosial ekonomi rendah, keluarga dengan keadaan gizi yang buruk, keluarga dengan sanitasi lingkungan yang buruk dan sebagainya.

Penyuluhan kesehatan pada sasaran kelompok dapat dilakukan pada kelompok ibu hamil, kelompok ibu yang mempunyai anak balita, kelompok masyarakat yang rawan terhadap masalah kesehatan seperti kelompok lansia, kelompok yang ada di berbagai institusi pelayanan kesehatan seperti anak sekolah, pekerja dalam perusahaan dan lain-lain. Penyuluhan kesehatan pada sasaran masyarakat dapat dilakukan pada masyarakat binaan puskesmas, masyarakat nelayan, masyarakat pedesaan, masyarakat yang terkena wabah dan lain-lain.

Kesadaran Masyarakat Mengenai Kesehatan Lingkungan

Kesehatan adalah satu bagian penting dari pembangunan secara menyeluruh.Pembangunan di bidang kesehatan pada substansinya merupakan.salah satu bagian dari pembangunan nasional. Dengan demikian pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan usia harapan hidup manusia,meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta untuk mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.Sedangkan peranan masyarakat dalam pembangunan kesehatan telah digariskan dalam suatu sistem kesehatan nasional (SKN).

Dengan demikian peningkatan derajat kesehatan merupakan aspek yang ikut berperan dalam mencapai taraf hidup keluarga yang lebih baik di masa yang akan datang. Kesehatan yang dimaksudkan adalah kesehatan pribadi, kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan yang perlu di tanamkan kepada setiap keluarga untuk di laksanakan sehari hari. Memanfaatkan air bersih dan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) serta ikut memeliharanya.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek alamiah. Sebagai lawanya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifatinduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisas. (Sugiyono, 2011:8). Sedangkan jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel,

baik satu variabel atau lebih, independen tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabelsatu dengan variabel lain. (Sugiyono, 2011 : 11).

Tempat Penelitian ini dilaksanakan Pada Wilayah kerja Pustu di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Yang merupakan wilayah kerja Pustu Desa Tanjung Dalam.

Observasi

Pada dasarnya observasi digunakan untuk merekam informasi atau data yang ada dilapangan dengan cara melakukan pengamatan dan catatan lapangan. Alex Munandar dalam buku (Sugiyono, 2011:166) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, sesuatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk melengkapi dua teknik sebelumnya, khususnya ditujukan kepada petugas pustu dan pemerintah Desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang. Wawancara merupakan metode pengumpulan data.

Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

Teknik Pemilihan Informan

Untuk menentukan informan pada penelitian ini akan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2011:96). Untuk menentukan objek atau orang-orang yang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri khusus atau kriteria yang diinginkan yang dimiliki oleh sampel itu. Menurut Spradley : 'situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya' dalam (Sugiono, 2007:221).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam pelaksanaan penelitian untuk melihat Efektivitas Penyuluh Kesehatan Dalam Peningkatan Kesadaran Kesehatan Lingkungan Pada Wilayah Kerja Pustu Desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang. peneliti melakukan pengambilan informan dengan menggunakan teknik "*purposive sampling*". tujuan peneliti menggunakan teknik ini adalah peneliti memilih sampel atau informan yang mengetahui tentang Kegiatan Penyuluhan di Desa Tanjung Dalam. Penulis mengambil informasi dari informan yang berjumlah 6 orang. Informan informan yang dimaksud itu terdiri dari Kepala Puskesmas Pembantu Desa Tanjung Dalam, Perawat Pustu, Bidan Pustu, Kepala Desa dan Masyarakat setempat.

Tabel 1. Karakteristik Informan Berdasarkan Kelompok Umur

NO	Umur Tahun	Jumlah
1	31-40	2
2	41-47	3
3	47-55	1
Jumlah		6

(Sumber : Penelitian april 2018)

Tabel 2. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pihak Pustu	
	Laki-Laki	1 Orang
	Perempuan	1 Orang
	Jumlah	2 Orang
2	Kepala Desa/Masyarakat	
	Laki-Laki	2 Orang
	Perempuan	2 Orang
	Jumlah	4 Orang
Jumlah Keseluruhan		6 Orang

(Sumber : Penelitian April 2018)

Tabel 3. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	SD/ Sederajat	-
2	SMP/Sederajat	2 Orang
3	SMA/Sederajat	2 Orang
4	S1	2 Orang
5	S2	-
Jumlah		6 Orang

(Sumber : Penelitian April 2018)

Berdasarkan tabel di atas informan yang di temukan di lapangan berjumlah 6 orang terdiri dari dari Pihak Pustu dan dari Kepala Desa/Masyarakat setempat. Untuk informan berdasarkan jenis kelamin ini baik laki-laki maupun perempuan jumlahnya berimbang.

Dari hasil penelitian yang ditemukan dalam judul Efektivitas Penyuluh Kesehatan Dalam Peningkatan Kesadaran Kesehatan Lingkungan Pada Wilayah Kerja Pustu Desa Tanjung Dalam. pada unsur yang telah ditentukan Pihak Pustu maupun dari Kepala Desa dan Masyarakat setempat. Setelah melakukan pengumpulan data di lapangan, maka selanjutnya peneliti melakukan tahapan proses pengolahan data. Proses pengolahan data ini selanjutnya menjadi hasil penelitian yang sistematis sebagai hasil wawancara penelitian kepada unsur yang ikut dalam Penyuluhan ini sebagai informan

Tabel 4. Berikut Tabel Hasil Kegiatan Penyuluhan berdasarkan jumlah KK :

No	Nama Pemilik Rumah	Jml KK	Jml Jiwa	Pendataan											
				Sumber Air yg Digunakan			Akses Sanitasi				SPAL		Pmbngan Sampah		
				SGL	PDAM	BOR	JSP	JSSP	Sharing	BABS	Ms	Tms	Ms	Tms	
1	Baksir	1	3			☐		☐					☐		☐
2	Medi Saputra	1	4			☐	☐						☐		☐
3	Endang	1	4			☐	☐						☐		☐
4	Suardi	1	4			☐		☐					☐		☐
5	Son	1	3			☐			☐				☐		☐
6	Ardani	1	5			☐		☐					☐		☐
7	Banu Sahari	1	4			☐		☐					☐		☐
8	Tamrin	1	4			☐		☐					☐		☐
9	Sahuri	1	5			☐		☐					☐		☐
10	Diana	1	5			☐	☐						☐		☐
11	Suardi	1	5			☐		☐					☐		☐
12	Muhammad	1	2			☐		☐					☐		☐
13	Kamaludin	1	4			☐		☐					☐		☐
14	Aswandi	1	4	☐				☐					☐		☐
15	Erwandi	1	4			☐		☐					☐		☐
16	Yuliana/Mahdi	2	5	☐		☐		☐					☐		☐
17	Mukminin	1	5	☐					☐				☐		☐
18	Sarifudin	2	3	☐				☐					☐		☐
19	Sukardi	1	5	☐				☐					☐		☐
20	Suprianto	1	4			☐			☐				☐		☐
21	Husni	2	4			☐		☐					☐		☐
22	Damanhuri	1	4			☐		☐					☐		☐
23	Busli	2	6			☐		☐					☐		☐
24	Johan	1	2			☐			☐				☐		☐
25	Sawani	1	3			☐			☐				☐		☐

Keterangan :

SGL	:Sumur Gali
JSP	:Jamban Sehat Permanen
JSSP	:Jamban Sehat Semi Permanen
Sharing	:Numpang
BABS	:Buang Air Besar Sembarangan
SPAL	:Saluran Pembuangan Air Limbah
MS	:Memenuhi Syarat
TMS	:Tidak Memenuhi Syarat



Dalam memperbaiki kesehatan masyarakat desa Tanjung Dalam khususnya pengelolaan air buangan masyarakat perlu berperan aktif atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki keadaan kesehatan lingkungan karena pada hakekatnya kegiatan tersebut adalah untuk melindungi dan memelihara kesehatan bersama. Berbagai bentuk peran serta dapat diberikan misalnya

Tenaga, pemikiran, material, dana dan perilaku sehat. Berbagai perilaku yang tidak sehat dapat menurunkan mutu lingkungan. Dengan demikian peran masyarakat dalam upaya kesehatan lingkungan tidak turun mutunya. Tidak harus semuanya berupa material atau dana. Sebelum mempunyai jamban sendiri misalnya bias menumpang tetangga. Hal tersebut adalah sudah sangat mendukung upaya kesehatan lingkungan.

Pembahasan

Efektivitas merupakan salah satu bentuk ketetapan dan kesesuaian kemampuan manusia dalam suatu program atau kegiatan yang memiliki tujuan yang sudah dibuat sebelumnya. Efektivitas dalam pelaksanaan program pemerintah seperti dana penyuluhan ini sangat berorientasi dalam ketetapan penggunaannya untuk dapat tercapainya tujuan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan kehidupan anak bangsa pada pendidikan semua kalangan masyarakat.

Efektivitas penyuluhan ini tentunya memiliki karakteristik sesuai dengan teori yang ada. Selanjutnya (Siagian, (1997:154), menguraikan beberapa indikator atau kriteria untuk menentukan tingkat efektivitas, yaitu sebagai berikut :

1. Tepat sasaran, pekerjaan yang dilakukan benar-benar tepat dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Dengan mengikuti petunjuk teknis penggunaan dana tersebut diharapkan mampu menempatkan apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari di buatkannya program tersebut, sehingga tidak menimbulkan masalah di kalangan masyarakat yang tidak mampu.
2. Tepat waktu, tingkat keberhasilan tugas-tugas yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan ditentukan atau tidak. Artinya bagaimana efisiensi waktu yang digunakan dalam penyaluran dana tersebut, apakah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada petunjuk teknis penggunaan, apakah waktu penyalurannya tepat seperti, penyaluran dari pemerintah Pusat ke pemerintah Provinsi, dari pemerintah Daerah Kabupaten ke puskesmas.
3. Tujuan tercapai sesuai rencana, apakah tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan kerja telah tercapai sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Diharapkan apa yang menjadi rencana awal dari kebijakan tersebut mampu terealisasi, mampu diwujudkan serta mampu di implementasikan sehingga kebijakan tersebut tidak menjadi sia-sia dan menjadi kebijakan yang berguna bagi khalayak luas.

Adapun perilaku masyarakat di Desa Tanjung Dalam tentang perilaku masyarakat dalam pembuangan kotoran (tinja) adalah pada umumnya masyarakat membuang kotoran di sungai, sehingga air sungai yang menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat menjadi tercemar. Setelah diadakan penyuluhan, sudah ada sebagian kecil dari masyarakat di Desa Tanjung Dalam yang mulai membuat MCK untuk membuang kotoran sehingga relatif lebih sehat.

Perilaku berhubungan dengan sikap karena apabila sikap individu dimanifestasikan kedalam bentuk tindakan (*action*) yang diamati, maka tindakan tersebut menjadi cermin dari perilakunya atau dengan kata lain bila sikap tersebut disalurkan keluar jadilah perilaku, jadi sikap adalah kecenderungan perilaku. Upaya yang dilakukan oleh penyuluh kesehatan adalah suatu proses untuk merubah sikap masyarakat desa Tanjung Dalam, dimana tingkat keberhasilan upaya tersebut akan terlihat dari perubahan perilaku masyarakat mengenai kesehatan lingkungan. Kecenderungan perilaku masyarakat Desa Tanjung Dalam sebelum diadakan penyuluhan adalah membuang sampah di tempat-tempat yang tidak seharusnya, seperti di sungai, dan dibelakang rumah. Setelah diadakan penyuluhan perilaku sebagian kecil masyarakat di Desa Tanjung Dalam sudah sedikit membaik yaitu dengan membakar sampa-sampah khususnya sampah keluarga agar tidak mengganggu keindahan atau bahkan menimbulkan penyakit. Menurut informan pokok penelitian, mengungkapkan bahwa perilaku masyarakat dalam pengelolaan tempat pembuatan sampah di Desa Tanjung Dalam dapat dilihat dalam hasil wawancara berikut ini. " mengumpulkan sampah terlebih dahulu di dapur-dapur , lalu dibuang atau dibakar dalam galian dan ada juga yang dibuang sembarangan". (*menurut Herman wawancara maret 2018*).

Faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan. Kesehatan lingkungan sangat luas, namun aspek-aspek yang paling mendesak untuk di perbaiki oleh masyarakat adalah :

1. Pembuangan Kotoran Manusia. Karena kotoran manusia diketahui merupakan sumber penyakit, maka kotoran tersebut perlu di isolasi "agar tidak tersebar kemana-mana. Jadi buang kotoran manusia hendaknya di jamban yang memenuhi syarat kesehatan
2. Penyediaan Air Bersih. Air merupakan kebutuhan pokok untuk kehidupan. Namun air dapat menimbulkan penyakit bila tercemar. Oleh karena itu air yang dipakai sehari- hari harus bersih. Air

sungai tidak dapat dijamin kebersihannya karena telah banyak tercemar kotoran manusia maupun kotoran lainnya. Air bersih dapat berasal dari sumur gali, sumur pompa, mata air yang dilindungi, air hujan.

3. Pembuangan Sampah. Sampah merupakan bahan yang sangat baik untuk perkembangan serangga dan tikus. Serangga yang dimaksud adalah lalat, kecoa, bisa juga nyamuk. Tikus suka mencari makanan disampah dan berlindung di timbunan sampah kasar. Binatang-binatang tersebut telah diketahui dapat menularkan penyakit. Oleh karena itu sampah harus ditangani sehingga tidak menyebabkan berkembangbiaknya binatang-binatang tersebut.
4. Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga. Air limbah rumah tangga sering tercemar kotoran manusia ataupun air seni yang dapat mengandung kuman penyakit. Oleh karena itu air limbah rumah yang tidak boleh mencemari air sumur. Air limbah yang tidak terurus dapat menimbulkan genangan air yang dapat merupakan sarang nyamuk yang mengganggu dan dapat menularkan penyakit. Disamping itu juga dapat menimbulkan bau, kecelakaan, pandangan kotor dan tanah tak dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu air limbah juga harus ditangani secara sehat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Masih banyaknya masyarakat yang belum menyadari betapa pentingnya kesehatan lingkungan.
2. Masyarakat masih kurang kesadaran membuang sampah tidak pada tempatnya.
3. Seringnya membuang kotoran dibelakang rumah dan mengubur tinja.
4. Masyarakat sering membiarkan air tergenang, pakaian bergantung dan membuang sampah sembarangan.
5. Masih banyaknya yang belum membuat saluran air limbah secara sehat.
6. Sebagian masyarakat masih membuang sampah disembarang tempat.
7. Masih ada masyarakat yang membuang kotoran disungai, dan masih banyak masyarakat yang belum memiliki jamban keluarga maupun WC yang layak

Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas penyuluh kesehatan dalam peningkatan kesadaran kesehatan lingkungan pada wilayah kerja PUSTU Desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang, diperlukan adanya skala prioritas yang dibuat oleh penyuluh kesehatan mengenai jenis kesehatan lingkungan masyarakat lebih focus dan pendanaan yang tidak terlalu besar.
2. Adanya bantuan dari instansi lain, seperti Dinas Kesehatan untuk ikut membantu peralatan yang dibutuhkan oleh penyuluh kesehatan terutama untuk keperluan demonstrasi dan percontohan di Desa Tanjung Dalam
3. Diperlukan adanya peningkatan fungsi Pustu Desa Tanjung Dalam sebagai pusat pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan upaya kesehatan khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kesehatan lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar. (1997). *Pengantar Pendidikan Kesehatan*. Jakarta.
- A.A. Gde Muninjaya. (2004). *Manajemen Kesehatan*. Penerbit Buku Kedokteran(220-234). Jakarta.
- Effendy. (1998). *Dasar-Dasar Kesehatan Masyarakat*. Jakarta. Entjang Indan. (1986). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Bandung.
- Gondhoyowono T. (1993). *Pendekatan Psikologi dan Ilmu Pendidikan Dalam Teknik Penyuluhan*, 699-705.
- Kusnoputranto, H. (1986). *Kesehatan Lingkungan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan UI.Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jakarta.
- Lexy j. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.Bandung.
- Maulana HDJ. (2009). *Promosi Kesehatan*. Jakarta.
- Siagian, Sondang P. (1997). *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta.
- Slamet Riyadi. (1982). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Surabaya.
- Sondang P.Siagian. (1994). *Filsafat Administrasi*. Jakarta.
- Sondang P.Siagian. (1997). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung.
- Sulih. (2002). *Pendidikan Kesehatan dalam Keperawatan*. Jakarta



Manajemen Pelayanan Publik Di Tengah Ancaman Pandemi COVID-19

Romdana

Study Program of Administration Public, STIA Bengkulu

Email: ¹⁾ romdanayahya123@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [29 Desember 2021]

Revised [18 Januari 2022]

Accepted [25 Januari 2022]

KEYWORDS

Manajemen,
Pelayanan publik,
Pandemi COVID

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimana Manajemen Pelayanan Publik Saat Pandemi COVID-19 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan populasi yaitu seluruh pegawai pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen pelayanan Publik Saat Pandemi COVID -19 pada Dinas Lingkungan Hidup cukup baik, namun masih ada hambatan sedikit, Perubahan Tataan hidup baru yang kita kenal **New Norma** membuat sebagian masyarakat yang datang ingin mendapatkan pelayanan harus melewati aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah protocol Kesehatan yaitu Pengecekan Suhu Tubuh, Cuci tangan dan pakai masker.kebiasan ini sedikit merepotkan masyarakat yang ingin mendapat pelayanan.Kemudian masih kuranya sosialisasi dari dinas bagaimana pelayan daring Online itu sehingga masyarakat memahami makna nya.

ABSTRACT

This study aimed to know how to manage public services during the COVID19 pandemic at Bengkulu City's Department of Environment, using a qualitative descriptive study with a population of all employees of the city's Department of Environment. Data was collected through observations, interviews and documents. The results show that the management of utilities during the COVID19 pandemic at the Department of Environment is quite good, but there are still some obstacles. The changes in the new life order we call New Norma require that some people who come for services must follow rules set forth by the government. Hygiene procedures, namely checking body temperature, washing hands and wearing masks. This routine is a bit inconvenient for people who want to receive services. Then there is still a lack of socialization from the service on how to do the service online so that people understand what it means..

PENDAHULUAN

Saat ini dunia sedang dihebohkan dengan munculnya Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, yang membawa dampak signifikan ke perubahan dunia. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari, hampir tak ada yang bisa berkecuali dari kemunculan virus *Covid-19* ini, tidak terkecuali terhadap pelayanan publik sejak virus corona pertama kali bulan Maret 2020 dinyatakan Pemerintah di Indonesia.. Sejak diumumkan kasus positif virus *Covid-19* di Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu, pemerintah meningkatkan langkah-langkah dalam menangani pandemi global dari *Covid-19*. Sejak awal Maret 2020, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial (*social distancing*), menghimbau untuk bekerja di rumah (*work from home*) bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap di rumah serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah. Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki resiko tinggi, hingga akhir Maret 2020 kebijakan pemerintah bukan hanya *social distancing* tapi dilanjutkan dengan *Physical Distancing*, dan juga pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dengan banyaknya instansi penyelenggara layanan publik yang membatasi layanan, menginisiasi layanan online bahkan sampai meniadakan pelayanan sementara, menjadi satu fenomena yang harus dilakukan. Pembatasan pelayanan publik ini mulai dilakukan oleh pemerintah sejak pertengahan bulan Maret 2020 ini, dimulai dengan meliburkan anak sekolah dengan meminta untuk belajar di rumah dan kemudian menghimbau kepada pegawai-pegawai untuk melakukan *Work From Home (WFH)*.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 tentang pelayanan publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada pasal 2 yaitu Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya

adalah pelayanan kepada masyarakat. Karenanya Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik dan profesional.

Menurut Moenir Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Sejauh ini pelayanan publik sudah menjadi hal yang penting di perusahaan ataupun lembaga. Pelayanan yang diberikan kepada publik harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Adanya standar pelayanan publik bertujuan untuk mendapatkan kualitas pelayanan bagi semua perusahaan atau lembaga.

Dari beberapa pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan harus ada berbagai unsur-unsur yakni bukti langsung, keandalan, daya tangkap, jaminan, dan empati sebagai tolok ukur antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang mereka terima atau peroleh. Dalam melakukan pelayanan publik pastinya terdapat suatu kondisi dimana kualitas pelayanan di rasa masih kurang. Masih banyak keluhan yang disampaikan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik.

Dengan adanya pembatasan pelayanan publik menjadi sedikit berkurang benefit yang diperoleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Akan tetapi, masyarakat tetap mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, dan masyarakat mempunyai peran dalam pengawasan terhadap pembatasan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Peran masyarakat sesuai dengan Undang-undang adalah, untuk mengawasi jalannya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Seperti yang diatur dalam Pasal 39 menjelaskan bahwa, masyarakat seharusnya disertakan mulai dari penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi jalannya pelaksanaan pelayanan publik.

LANDASAN TEORI

Pengertian Manajemen

Menurut Shafritz dan Russel manajemen adalah berkenaan dengan orang yang bertanggung jawab menjalankan organisasi dan proses menjalankan organisasi. itu sendiri, yaitu pemanfaatan sumber daya seperti orang dan mesin untuk mencapai tujuan organisasi Donovan dan Jackson mendefinisikan manajemen sebagai proses yang dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu, sebagai rangkaian keterampilan (*skill*) dan sebagai rangkaian tugas. Dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah ilmu, proses dan sistem yang mengubah berbagai sumber daya (manusia, mesin) dalam suatu ruang usaha yang berguna bagi kemanusiaan serta untuk mencapai tujuan organisasi melalui kerjasama dengan orang lain secara sistematis, efektif dan efisien.

Pengertian Pelayanan

Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah "service" A.S. Moenir mendefinisikan "pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna". Secara konseptual manajemen publik menurut Norman menyebutkan bahwa, pelayanan adalah proses sosial, dan manajemen merupakan kemampuan untuk mengarahkan proses-proses social.

Pengertian Publik

Dalam terma sehari-hari di Indonesia kata "*Public*" dipahami sebagai negara atau umum. Hal ini dapat dilihat dalam bahasa Indonesia, menerjemahkan *public transportation* yang dimaknai sebagai kendaraan umum atau *public administration* yang diterjemahkan sebagai administrasi negara. Secara etimologis "*public*" berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yakni "*Pubes*" berarti kedewasaan secara fisik, emosional, maupun intelektual. Dalam perspektif sosiologi dan psikologi istilah "*Pubes*" seringkali disebut dalam terma lain yakni "*Puber*". Terma *puber* kemudiannya diinterpretasikan sebagai tahapan kehidupan sosial dalam masa transisi di mana yang mulanya berorientasi pada diri sendiri menjadi memikirkan orang lain di luar dirinya.

Tujuan pelayanan publik

menurut Juliantara adalah memuaskan atau sesuai dengan keinginan masyarakat/pelanggan pada umumnya Sedangkan Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, Tujuan pelayanan publik adalah menyediakan pelayanan yang terbaik bagi publik atau masyarakat. Pelayanan yang terbaik adalah pelayanan yang

memenuhi apa yang dijanjikan atau apayang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan terbaik akan membawa implikasi terhadap kepuasan publik atas pelayanan yang diterima. Pelayanan yang terbaik dapat menimbulkan kepercayaanmasyarakat yang menjadi dasar atas citra lembaga.

Pengertian Manajemen Pelayanan Publik

Pemahaman makna publik dalam pelayanan publik perlu dipahami, baik dalam perkembangan histories atau latar belakang munculnya dan aplikasinya di dalam manajemen publik. Dalam perkembangan ilmu administrasi publik, konsep “publik” bermakna luas dari pada hanya “*government*” (pemerintah saja), seperti keluarga, rukun tetangga, organisasi non- pemerintah, asosiasi, pers,dan bahkan organisasi sektor swasta. Sebagai akibatnya konsep publik yang luas ini, nilai-nilai keadilan, kewarganegaraan (*citizenship*), etika, patriotisme, dan reponsiveness menjadi kajian penting disamping nilai nilai efisiensi dan efektivitas.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Bogdandan Taylor pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati Dengan pendekatan kualitatif ini, penulis mendapatkan data berupa hasil tulisan-tulisan atau lisan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu, dimana penulis tetap kritis terhadap data yang didapatkan. Selain itu, penggunaan pendekatan kualitatif juga sebagai cara penulis untuk berpikir secara induktif, yaitu penulis menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudianberupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang peneliti ambil adalah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti ambil adalah :

a. Data Primer

Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung. Melalui dokumentasi dan interview (wawancara).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer.Sumber sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari seminar,buku-buku maupun literature lain. Data sekunder adalah data yang telah disalin dari sumber pertama, mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti laporan hasil rapat kerja, laporan tahunan, laporan keuangan serta hasil-hasil penelitian yang berwujud media, seperti koran, buletin dan majalah. Selain itu juga dibutuhkan dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

3. Populasi

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil diperoleh dari menghitung atau mengukur kuantitas maupun kualitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan populasi yakni semua karyawan dan staff pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.

4. Sampel

Pengambilan sampel (*sampling*) adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Sekretaris dan Staff.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data penelitian. Tanpa mengetahui teknik penelitian, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Selanjutnya jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview wawancara,kuesioner, (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Sedangkan dalam hal ini peneliti hanya akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pelayanan Publik pada Dinas lingkungan Hidup Kota Bengkulu saat ancaman pandemic COVID-19

Dewasa ini manajemen layanan publik sangat diperhatikan oleh suatu lembaga, tak terkecuali Dinas Lingkungan Hidup kota Bengkulu. Sejak diumumkan kasus positif virus *Covid-19* di Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu, pemerintah meningkatkan langkah-langkah dalam menangani pandemi global dari *Covid-19*. Dalam kondisi pandemi covid 19, maka penting untuk kemudian mengeluarkan kebijakan perubahan standar pelayanan sehingga masyarakat tetap dapat mengakses pelayanan tanpa ada alasan bahwa pelayanan tidak dapat diberikan karena alasan kondisi pandemi covid 19. Bahkan saat adanya perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dilarang mengakibatkan terhentinya kegiatan pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU Pelayanan Publik. Perubahan standar pelayanan ini harus terinformasikan dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk berupa website, pamflet ataupun media sosial.

Guna menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tatanan normal baru yang mendukung produktifitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sebagai salah satu institusi yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat telah melakukan perubahan system kerja Apaatur Sipil Negara agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru, sehingga aman dalam situasi pandemic Covid-19. Tindak lanjut tersebut diantaranya dilakukan dengan memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan melalui Penetapan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu tentang Prosedur Operasional Standar Pelayanan Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Lingkungan, serta Registrasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Tatanan Normal Baru di DLH Kota Bengkulu Nomor : 050/12/1141 Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020.

Berbagai pelayanan publik yang dalam prosesnya membutuhkan koordinasi dalam bentuk rapat selalu diupayakan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui rapat daring. Apabila dilakukan secara offline maka harus memperhatikan protokol kesehatan dan physical distancing. Saat Pandemi COVID 19 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu seluruh pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan publik baik itu berupa pemberian rekomendasi perizinan Lingkungan, registrasi pengawasan dan lain-lain agak kesulitan karena kerja dilakukan sistem online kebijakan pimpinan melaksanakan Work From Home (WFH) yaitu a kerja dari rumah dan pelayanan yang membutuhkan harus bertemu ada kebijakan kontak person terhadap pegawai yang bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya dengan tetap memperhatikan Protokol kesehatan dalam arti seorang pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat atau instansi harus sama-sama mentaati aturan protocol kesehatan harus pakai masker saat masuk kantor tangan harus dicuci pakai sabun yang sudah disediakan oleh kantor baik itu sabun, air dan tisu. dan sebelum masuk kantor terlebih dahulu harus diperiksa suhu tubuh guna untuk mendeteksi apa yang bersangkutan suhu tubuhnya tinggi atau normal.

Untuk seluruh pelayanan publik yang menyangkut kebutuhan baik itu instansi pemerintah, swasta, ataupun kelompok usaha lain saat pandemic ini seluruh pelayanan aturannya tidak baku artinya bisa berubah suatu saat karena Pemerintah Pusatpun memberikan kewenangan kepada daerah yang penting selalu mematuhi protocol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah. Sehingga akan berlaku manajemen pelayanan publik yang sesuai aturan yang sudah ditetapkan pemerintah tetapi bisa berubah sesuai situasi yang berkembang. Manajemen pelayanan ini di dinas Lingkungan hidup diterapkan sesuai kebutuhan dan tingkat pelayanan yang diberikan contoh, saat mulai Pandemi ditetapkan aturan harus kerja dari rumah atau Online tetapi seandainya pelayanan yang dibutuhkan harus segera bertemu seperti registrasi Izin lingkungan hidup maka pegawai harus melakukan kesepakatan kepada pihak yang ingin berurusan untuk datang ke kantor dengan waktu yang sudah ditentukan.

Pembahasan

Saat Pandemi COVID -19 ini melanda seluruh dunia, termasuk Negara Republik Indonesia semua melakukan penanganan antisipasi supaya penularan Virus Corona tidak berkembang dengan cepat, tapi kenyataannya jangankan negara berkembang seperti Indonesia negara Maju pun sangat kualahan dengan pandemi Covid 19 ini yang begitu massif perkembangannya sehingga merusak tatanan kehidupan manusia terlebih lagi tatanan ekonomi sehingga bisa mengarah kepada resesi ekonomi negara. Tatanan hidup baru dengan menerapkan protokol kesehatan bukan berarti kembali hidup dalam

keadaan sebelum pandemi terjadi. Kebiasaan mencuci tangan pakai sabun, mengenakan masker, menjaga jarak fisik termasuk menjaga daya tahan tubuh wajib dilakukan. Pemberlakuan protokol kesehatan dengan pembatasan pergerakan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah tentunya berdampak langsung pada masyarakat, tak terkecuali pada sektor pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat seperti administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan kesehatan di berbagai tingkatan fasilitas kesehatan, pelayanan keuangan pada sektor jasa perbankan dan lain-lain.

Berdasarkan hasil dari Survei Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI pada tahun 2019 menunjukkan 70,3 % responden masih nyaman untuk mengurus secara langsung dibandingkan dengan mekanisme daring atau memakai jasa perantara. Selain itu, terkait kenyamanan dalam mengakses informasi tentang standar layanan, sebanyak 51,6 % responden memilih untuk bertanya langsung kepada petugas. Adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat. Hal ini didasari bahwa kecenderungan masyarakat Indonesia untuk mengakses layanan publik secara langsung masih sangat dominan sementara infrastruktur penunjang untuk pelayanan publik yang berbasis *online* masih belum optimal baik dari sisi penyelenggara negara maupun sosialisasi pada masyarakat terhadap akses layanan publik secara online. Kebijakan *new normal* dengan penerapan protokol kesehatan tentunya membuat akses pelayanan publik kepada masyarakat menjadi terbatas. Hal tersebut dapat dijadikan upaya bagi penyelenggara pelayanan publik untuk memaksimalkan pelayanan publik dengan beralih ke sistem *online* yang selama ini telah berjalan. Upaya peralihan ini tentunya mesti dibarengi dengan memberi edukasi/pemahaman serta sosialisasi secara masif kepada seluruh elemen masyarakat yang akan mengakses layanan publik untuk memanfaatkan sistem *online* dalam setiap layanan publik yang akan diakses sehingga pelayanan publik di tengah tatanan kehidupan baru "*new normal*" tidak terganggu dan menjadi lebih efektif dan efisien.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sebagai lembaga Pemerintah yang mempunyai Tugas bidang Lingkungan Hidup dibawah pemerintah Kota yang salah satu Fungsinya adalah Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup, Pemberian rekomendasi perizinan pendaurulangan pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah. Kesemuanya ini harus melakukan kajian dan terjun ke lapangan yang secara fakta harus mendatang orangnya untuk ikut melaksanakan tugasnya memantau dan melihat secara dekat, saat pandemic ini disatu sisi pemerintah harus mencegah bagaimana penyebaran COVID 19 ini tidak meluas di satu sisi tuntutan pekerjaan harus melakukan pengawasan secara langsung.

Kemudian dari sisi SDM nya bahwa penggunaan aplikasi untuk online tidak semua bisa menguasai walaupun ada tenaga khusus yang bisa tapi semua pekerjaan harus dilakukan serentak hal ini kesulitan sekali untuk mengerjakannya. Seiring diberlakukannya era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau *new normal* di masa tanggap darurat Covid - 19, sektor layanan publik yang sempat mengalami pembatasan atau menghentikan layanan sementara, mulai beraktivitas menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Momentum ini tentunya menjadi kelegaan bagi masyarakat yang sempat tertunda mengakses layanan publik. Antusiasme beroperasinya kembali layanan publik diharapkan tidak menimbulkan permasalahan baru dan polemik di masyarakat. Dengan alasan upaya pencegahan, penyelenggara layanan mulai melakukan penyesuaian diantaranya: pembaruan jam layanan, penambahan syarat layanan dan jangka waktu layanan serta mekanisme layanan dari langsung menjadi *online* (daring). Perubahan terhadap standar pelayanan di masa adaptasi kebiasaan baru harus dilakukan sesuai dengan prosedural dengan melibatkan dan menginformasikan secara masif kepada masyarakat.

Bagi pengguna layanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu mereka juga kesulitan dan merasa berat untuk mendapatkan pelayanan hanya registrasi perizinan harus menggugah sendiri dan ngisi data secara Online sebagian tidak terbiasa hal yang pembaharuan yang sistem jaringan mereka selama ini sudah biasa mengurus perizinan cukup kekantoran menunggu antrian sebentar langsung selesai. Sementara aturan yang mengikat bahwa setiap pelayanan publik saat Pandemi ini yang bisa dilakukan dirumah maka harus dikerjakan dirumah, pastinya protokoler kesehatan harus diperhatikan. Saat memasuki New Normal atau Tatanan baru walaupun pelayanan publik sudah dibuka tetap saja menjadi persoalan yang dirasakan oleh pengguna layanan dari DLH , mereka belum terbiasa untuk mengurus sesuatu kekantor harus melewati beberapa protokoler kesehatan mulai dari pengecekan suhu Tubuh, cuci tangan sampai kepada memakai masker yang semuanya dengan berat mereka sampaikan, tapi disatu sisi kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID 19 ini kita harus ikuti protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Inilah permasalahan yang kita hadapi bagi pelayanan publik khususnya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Tentu berimbang pada registrasi perizinan yang masih ada belum dilaporkan karena mereka merasa ribet untuk berurusan sambil menunggu situasi normal sepeerti biasa.

Disisi lain dari Dinas DLH sendiri merasa masih kurang untuk melakukan sosialisasi kepada publik khususnya kepada masyarakat yang ingin mengurus perizinan terkait *masalah* Lingkungan hidup. Dinas DLH Sendiri menyampaikan sosialisasi pelayanan ini kadang lewat media Elektronik ataupun media online

sehingga kadang belum tersampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut. Disinilah barangkali permasalahannya karena kita dihadapkan dengan situasi yang serba sulit apalagi saat pandemic mulai berlangsung sekitar bulan maret Lalu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Manajemen Pelayanan Publik yang diberikan saat Pandemi COVID-19 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu secara menyeluruh sudah baik tapi karena terkendala dengan aturan protokoler kesehatan dari Pemerintah maka pelayanan cukup terkendala
2. Pandemi Covid19 membuat sektor pelayanan publik terutama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu melakukan penyesuaian seiring tuntutan keadaan yang membuat berubah sehingga bisa menimbulkan masalah karena kendala Online / Daring

Saran

Agar Saat masa Pandemi ini membuat pelayanan publik semakin hari semakin berbenah untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan terutama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Pengambil kebijakan harus peka terhadap situasi saat ini, karena untuk menyesuaikan istilah AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) atau New Normal dimasa tanggap darurat COVID-19

DAFTAR PUSTAKA

- Ainus Sa'di M.Yusron. 2018 Skripsi Manajemen Layanan Publik Dalam Citra lembaga (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Wali Songo Sidoarjo)
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Donovan dan Jackson, dalam Yeremias T. Keban. 1991. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.
- H.A.S, Moenir. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ruslan, Rosady. 2013. *Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Purnama, Nursya"bani. 2006. *Manajemen Kualitas: Perspektif Global*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Juliantara, Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.
- James, A. F. Stoner, DKK. 1996. *Manajemen*. Edisi Indonesia. Jakarta: PT. Prenhallindo.



Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Dinas Sosial Kota Bengkulu

Anwar Hamid

Study Program of Administration Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu

Email: ¹⁾ anwarhamid2020@gmail.com ;

ARTICLE HISTORY

Received [29 Desember 2021]

Revised [18 Januari 2022]

Accepted [25 Januari 2022]

KEYWORDS

Lansia, Kesejahteraan,
Peraturan Daerah

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Informan yang di pilih berjumlah 17 orang dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan aspek dari Perda pasal 29 sampai 36 dan teori Grindle yaitu isi kebijakan (kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang terlibat) dan konteks implementasi (kekuasaan kepentingan dan strategi aktor, karakteristik lembaga, kepatuhan dan daya tanggap) Hasil penelitian dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia oleh Dinas Sosial di Kota Bengkulu, berdasarkan aspek Lansia dikelompokkan menjadi Lansia potensial dan tidak potensial yang tidak mampu. Pemberian bantuan memberikan manfaat yang dirasakan oleh Lansia belum optimal karena masih banyak yang belum merasakan manfaat program yang dibuat. Sehingga Derajat perubahan belum optimal karena angka peningkatan Lansia setiap tahun bertambah. Pelaksana program dan sumberdaya yang ada belum optimal karena masih ada ditemui permasalahan dari pelaksana program. Konteks Kebijakan berdasarkan Perda mengenai koordinasi dan Kelembagaan sudah cukup baik dari segi kekuasaan kepentingan dan strategi aktor serta karakteristik lembaga. Daya tanggap dan kepatuhan masyarakat masih belum optimal karena kurangnya sosialisasi.

ABSTRACT

The method used is a descriptive qualitative research approach. The results of the study in an effort to improve the well-being of the Elderly by the Social Service in the City of Bengkulu, the elderly are grouped into two parts, namely the potential elderly and incapable non-potential elderly. The provision of assistance consisted of providing productive economic assistance (UEP) for the elderly given to 30 potentially disadvantaged Lansia in the city of Bengkulu and assistance from the elderly social assistance (ASLUT) given to 105 elderly people in Bengkulu City and elderly care given to 50 elderly people managed by Charity Noble LKS is given to non-potential elderly people who cannot afford it. The improvement of the welfare of the elderly has not been proven optimally, the data collection for the elderly has not been evenly distributed, the assistance that has not been able to meet the needs of the elderly.

PENDAHULUAN

Pemerintah membuat kebijakan atau memberikan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah demi terciptanya kehidupan yang layak. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga meliputi kebijakan untuk kaum lanjut usia atau biasadisebut dengan Lansia. Sesuai dengan amanat pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tertuang dalam Pancasila sila ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang disusun pemerintah, maka kebijakan tersebut akan diimplementasikan. Dimana menurut Lane dalam (Aminudin 2017:65), implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation (intention, output, outcome)*. Implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, *implementation (policy, formator, implementator, initiator, time)*. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implemen tator dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasi dengan hasil kegiatan pemerintah. Akan tetapi pada kenyataannyadiketahui bahwa betapapun baiknya rencana atau tujuan dari kebijakan yang telah dibuat tidak ada gunanya apabila kebijakan tersebut tidak dilaksanakan atau direalisasikan dengan baik dan benar. Sehingga untuk mengatasi masalah tentang kesejahteraan Lansia perlu adanya pelaksanaan.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan kaum Lansia maka dibentuklah Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia. Undang-Undang No. 13 tahun 1998 menjelaskan bahwa masyarakat yang dikategorikan sebagai penduduk Lansia adalah masyarakat yang berusia 60 tahun lebih. Dalam upaya menyejahterakan kaum Lansia, diharapkan agar Lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial Lansia.

Persentase Lansia yang kian meningkat setiap tahunnya berimplikasi tidak hanya pada kehidupan Lansia semata, akan tetapi memberikan dampak terhadap kehidupan generasi lainnya. Mereka yang berada pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) ikut menanggung kehidupan para Lansia yang sudah tidak berkontribusi aktif secara ekonomi. Hal ini tergambar melalui rasio ketergantungan Lansia yang persentasenya cenderung merangkak naik setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya persentase Lansia. Pada tahun 2017, rasio ketergantungan Lansia cenderung mengalami peningkatan selama satu windu terakhir menjadi 14,02 persen yang artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 14 orang Lansia. Tingginya angka ketergantungan menyebabkan sulitnya keluarga memenuhi kebutuhan rumah tangga, keluarga tidak mampu menyisihkan uang bagi pengembangan sumber daya manusia dan bagi peningkatan kualitas hidup.

Kota Bengkulu merupakan salah satu kota yang sadar akan pentingnya peningkatan kesejahteraan kaum Lansia. Karena setiap tahun angka Lansia terus meningkat dan perlu penanganan khusus maka pemerintah Kota Bengkulu membuat suatu kebijakan tentang Kesejahteraan Lansia yang disusun dalam suatu Peraturan Daerah No 04 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia. Melalui Perda ini pemerintah berharap kemudahan akses pelayanan di bidang keagamaan, kesehatan, kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia, tidak ada lagi Lansia yang terlantar, Lansia yang tidak potensial akan diberdayakan dan Lansia potensial akan diberikan bantuan usaha

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Budiardjo (1972) dalam (Ali, 2011:11) mengungkapkan dalam kebijakan akan ditemukan sejumlah keputusan, dan setiap keputusan berada dalam proses pengambilan keputusan. Ketika sejumlah keputusan dikumpulkan maka hal itu akan terwujud sebagai suatu kebijakan. Menurut Dunn (1981) dalam (Ali, 2011:13) menyebutkan bahwa kebijakan adalah hubungan dari unit pemerintahan dengan lingkungannya dan kebijakan adalah apapun yang hendak pemerintah lakukan atau tidak dilakukan.

Demikian juga halnya menurut Anderson dalam (Suparno, 2017:7) kebijakan adalah *"a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"*. Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Merujuk penjelasan di atas Anderson dalam (Suparno, 2017:7) mengatakan *"public policies are those developed by governmental bodies and officials"* yang artinya kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan badan dan pejabat pemerintah. Selanjutnya, menurut Anderson implikasi dari pengertian kebijakan publik adalah :

- a. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.
- c. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu.
- d. Bahwa kebijakan negara bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Bahwa kebijakan pemerintah didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Dari berbagai pengertian di atas, peneliti dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan yang mempunyai rangkaian konsep, asas dan strategi yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dan mengatasi masalah publik

Perda No 04 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia

Upaya peningkatan kesejahteraan Lansia tertuang pada Perda Lansia No. 04 tahun 2016 pasal 8 yang meliputi: Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan



kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam pengurusan administrasi pemerintahan dan penggunaan fasilitas umum, pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, bantuan sosial dan perlindungan sosial.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya memilih fokus pada pasal 8 ayat g yaitu bantuan sosial karena jumlah penyandang masalah kesejahteraan Lansia yang ter data oleh Dinsos masih banyak dan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dinsos sebagai salah satu Dinas yang menjadi pelaksana Perda Lansia hanya menjalankan Perda Lansia pada pasal 8 ayat g yaitu bantuan sosial. Program bantuan sosial dalam Perda Lansia diatur dalam pasal 28 sampai pasal 36 yaitu berkaitan dengan bantuan sosial untuk Lansia Potensial yang tidak mampu yang terdiri dari penjelasan mengenai jenis bantuan, pada pasal 29 menjelaskan tentang tujuan pemberian bantuan, pasal 30 menjelaskan mengenai peran pelaksana program dalam menentukan penerima bantuan harus sesuai dengan keahlian keterampilan, minat dan bakat Lansia. Selain itu juga pada pasal 30-33 menjelaskan tentang pemberian bantuan kepada Lansia tidak potensial yang tidak mampu dan kriteria dalam memberikan bantuan kepada Lansia tidak potensial yang tidak mampu. Pada pasal 34-35 menjelaskan tentang kelembagaan dan koordinasi dalam melaksanakan Perda Lansia.

Penelitian ini menggunakan aspek yang diambil dari Perda yaitu sasaran pemberian bantuan, tujuan pemberian bantuan, pelaksana program, kelembagaan dan koordinasi. Dari aspek tersebut peneliti juga menggabungkan antara Perda dengan teori implementasi dari Grindley yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan. Sehingga dengan demikian melalui penelitian ini dapat diketahui seperti apa upaya peningkatan kesejahteraan Lansia di Kota Bengkulu khususnya yang dilakukan oleh Dinsos Kota Bengkulu

Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dari penelitian ini dimulai dari pemikiran peneliti dan keingintahuan peneliti mengenai Lansia di Kota Bengkulu secara mendalam. Dimana yang ingin diketahui oleh peneliti adalah masalah peningkatan Lansia di Indonesia setiap tahunnya dan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan Lansia kurang mampu yang terus mengalami kenaikan. Kemudian kebijakan dari masalah Lansia diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 04 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia. Kebijakan yang sudah di putuskan oleh pemerintah akan ditelaah lebih mendalam lagi mengenai seperti apakah implementasi Perda tersebut. Selanjutnya berangkat dari keingintahuan peneliti mengenai implementasi Perda khususnya pada pasal 8 (1) huruf g yaitu bantuan sosial. Peneliti membahas mengenai paragraf 1 dan 2 pada Perda No 04 tahun 2016 yaitu bantuan sosial bagi Lansia potensial dan Lansia tidak potensial yang tidak mampu karena point yang peneliti pilih lebih berkenaan dengan masalah yang ingin ditelaah dan diteliti oleh peneliti lebih dalam lagi selain itu peneliti juga melihat dari fenomena masalah yang ada bahwa jumlah Lansia yang terlantar atau tidak potensial yang tidak mampu di Indonesia masih cukup besar yaitu sebanyak 2.1 juta jiwa dan berpotensi tidak potensial sebanyak 1,8 juta jiwa dari 21,7 juta jiwa Lansia di Indonesia pada tahun 2017 dan di Kota Bengkulu jumlah Lansia yang ter data oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu sebagai penyandang masalah kesejahteraan pada tahun 2017 sebanyak 452 Lansia. Pada penelitian mengenai implementasi perda tentang Lansia peneliti menggunakan model implementasi menurut Grindle, karena model implementasi Grindle menjelaskan bahwa dalam tahapan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Pendekatan Kualitatif menurut Creswell (2014:4) merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Strategi yang akan dilakukan pada penelitian yang akan dilakukan adalah kualitatif studi kasus. Kualitatif studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2014:19-20).

Fokus dan Aspek Penelitian

Penetapan fokus penelitian dimaksudkan agar memperjelas ruang lingkup penelitian pembahasan penelitian, sehingga terhindar dari pengumpulan data-data pada bidang yang terlalu umum dan luas. penelitian yang akan dilakukan dimaksudkan untuk melihat dan mengetahui mengapa Implementasi Perda

Kota Bengkulu No 04 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia khususnya pada pasal 8 ayat 1 poin g tentang bantuan sosial belum optimal.

Dari Perda tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi perlindungan sosial dan kesejahteraan Lansia, peneliti memilih aspek berdasarkan Perda Lansia di bagian bantuan sosial pasal 28 sampai pasal 36 dengan menghubungkan teori implementasi dari Grindle, dimana dalam keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Karena teori implementasi dari Grindle yang peneliti pilih lebih berkenaan dengan masalah yang ingin ditelaah dan diteliti oleh peneliti lebih dalam lagi seperti kepentingan yang dipengaruhi dari kebijakan perda Lansia, tipe manfaat yang akan diterima oleh Lansia, derajat perubahan yang dirasakan oleh Lansia sebelum dan sesudah menerima bantuan, siapa pelaksana program dan sumber daya yang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai Lansia. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui karakteristik, strategi dan daya tanggap lembaga atau dinas terkait yang melaksanakan kebijakan. Selain itu peneliti juga melihat dari fenomena masalah yang ada bahwa jumlah Lansia yang terlantar atau tidak potensial yang tidak mampu di Indonesia masih cukup besar yaitu sebanyak 2.1 juta jiwa dan berpotensi tidak potensial sebanyak 1,8 juta jiwa dari 21,7 juta jiwa Lansia di Indonesia pada tahun 2017 dan di Kota Bengkulu jumlah Lansia yang terdata oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu yang terdata sebagai penyandang masalah kesejahteraan pada tahun 2017 sebanyak 452 Lansia

Lokus/Tempat Penelitian

Lokasi Penelitian akan dilakukan di Dinas Sosial Kota Bengkulu. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan cara menentukan lembaga yang menjadi penyelenggara perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial bagi Lansia. Dinas Sosial Kota Bengkulu merupakan unit yang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan kesejahteraan Lansia dalam hal pemberian bantuan sosial.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan audio visual.

1. Observasi

Observasi menurut Creswell (2014:267) merupakan kegiatan yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu individu di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan mendatangi rumah rumah Lansia yang merupakan penerima bantuan dan mendatangi Lansia yang masih ada di jalan di lingkungan Kota Bengkulu. Selain itu peneliti juga merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur atau semi struktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti).

2. Wawancara

Menurut Creswell (2014:267) wawancara dapat dilakukan dengan cara *face to face interview* dengan partisipan, mewawancarai dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* yang terdiri dari 6 sampai 8 orang per kelompok. Wawancara seperti itu memerlukan pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan. Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti melakukan wawancara dengan cara *face to face interview* dengan partisipan dan memberikan pertanyaan terbuka kepada informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah dokumentasi berupa makalah, koran, *diary* peneliti, buku harian, *e-mail* dan surat menyurat (Creswell, 2014:270). Pada penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi mengenai surat menyurat berkaitan dengan penelitian dan mengambil berita dari surat berita *online* yang berkaitan dengan penelitian.

4. Audio-Visual

Data penelitian kualitatif juga berupa foto, objek objek seni, *videotape*, atau segala jenis suara/bunyi (Creswell, 2014:270). Pada penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mengambil foto dan merekam pada saat melakukan observasi dan wawancara

Informan Penelitian

Informan memiliki peran yang penting dalam penelitian ini yaitu sebagai pemberi data yang memberikan informasi data primer dan sekunder. Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti memilih informan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti serta melihat kemampuan yang dimiliki oleh informan terkait masalah yang akan di kaji.

Penelitian yang akan dilakukan ini dalam memilih informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan informan dengan mempertimbangkan kemampuan informan untuk memberikan data yang akurat dan lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan berdasarkan data-data yang diperoleh langsung dari lapangan dari tanggal 5 Januari – 25 Januari 2019 dengan melalui proses teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi secara langsung dan mengambil dokumentasi yang mendukung penelitian. Hasil yang didapat merupakan penjelasan yang menyajikan mengenai keterangan-keterangan yang ditemukan di lapangan selama penelitian. Data-data yang berhasil peneliti kumpulkan tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan yang sesuai mengenai implementasi Perda No 04 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia khususnya pada pasal 8 ayat 1 huruf g yaitu bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu.

Karakteristik Informan

Informan penelitian merupakan sumber data yang digunakan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih informan yang mengetahui informasi yang peneliti butuhkan, karena informan yang dipilih dalam kesehariannya berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti pada tahun 2018. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 17 orang.

peneliti menemukan jawaban bahwa dari Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam menentukan penerima bantuan mereka memilih calon penerima yang telah memiliki usaha, bantuan yang diberikan bersifat untuk pengembangan usaha bukan untuk membuat usaha baru. Dinas Sosial juga tidak memberikan pelatihan atau pembinaan kepada Lansia penerima bantuan, Dinas Sosial hanya memberikan pendampingan kepada Lansia penerima bantuan dalam hal penggunaan dana bantuan yang diberikan

Peneliti melakukan wawancara kepada para Lansia penerima bantuan mengenai apakah mereka bekerja sesuai dengan keahlian mereka atau tidak. Peneliti menemukan bahwa dalam pemberian bantuan UEP bagi Lansia, Dinas Sosial memilih penerima bantuan yang sudah memiliki usaha, jadi bantuan yang diberikan tidak melakukan pembinaan atau pelatihan. Dinas Sosial dalam pemberian bantuan hanya melakukan pengarahan mengenai penggunaan dana bantuan. Dari informan peneliti juga menemukan fakta bahwa para lansia yang bekerja ada sebagian yang melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan keahlian, namun para Lansia terpaksa melakukannya karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan. Dari hasil wawancara dan observasi peneliti menemukan bahwa dari bantuan yang diberikan belum menunjukkan perubahan karena tidak adanya bimbingan atau pelatihan, sehingga para penerima bantuan tidak mengalami perubahan atau peningkatan dalam hal produksi dan peningkatan keahlian. Selain itu pemberian bantuan juga diberikan kepada Lansia yang telah memiliki usaha bukan para Lansia yang tidak mempunyai usaha. terkadang tidak dilibatkan dalam pendataan penduduk termasuk Lansia, karena kebanyakan dinas memiliki orang tersendiri untuk langsung melakukan pendataan kelapangan dengan berpedoman pada data dari BPS.

Berkaitan dengan pendataan para Lansia, peneliti menanyakan kepada para Lansia bagaimana cara Dinsos melakukan pendataan. Semua memberikan jawaban yang sama yaitu, para Lansia sebelumnya tidak tau akan mendapatkan bantuan (para Lansia tidak pernah mengusulkan kepada Dinas Sosial ataupun ke Kelurahan), saat para pegawai Dinas Sosial dalam hal ini pendamping mendatangi para Lansia, pendamping mengatakan kepada Lansia bahwa para Lansia akan menerima bantuan modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa Dinas Sosial tidak melakukan koordinasi kepada pihak kelurahan sehingga penerima bantuan tidak sesuai dengan yang di harapkan karena tidak menggunakan data yang ada di Kelurahan. Pelaksana program dalam suatu kebijakan sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan, pelaksana program menjadi tolak ukur sejauh mana program diimplementasikan. Untuk mengetahui siapa yang menjadi pelaksana program dari bantuan UEP Lansia peneliti melakukan wawancara kepada informan yang terkait dalam program UEP Lansia.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada keluarga Lansia mengenai ke mana para Keluarga akan pergi ketika ingin meminta bantuan, IH mengatakan bahwa IH ketika meminta bantuan mengenai Lansia, IH akan mendatangi Dinsos. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa kepatuhan dan daya tanggap pelaksana program menurut Dinsos sudah baik, meskipun masih ada beberapa kekurangan namun masih bisa dimaklumi. Selain itu peneliti menemukan bahwa dari sisi masyarakat, masyarakat dalam hal ini keluarga atau Lansia belum mengetahui dinas dinas yang menangani masalah Lansia sehingga para keluargadan Lansia ketika mendapatkan masalah mereka akan pergi ke Dinsos.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan kepada Lansia potensial, tidak potensial yang mendapatkan bantuan tanggapan Para Lansia dan Keluarga Lansia mengenai upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan Lansia masih dinilai kurang karena bantuan yang diberikan kepada Lansia belum mampu meningkatkan kesejahteraan hidup Lansia serta untuk pemenuhan kebutuhan hidup para Lansia, masih sangat bergantung kepada keluarga. Selain dari bantuan yang

diberikan belum mampu memenuhi kebutuhan Lansia, peran para pendamping juga di rasa kurang optimal karena masih banyak Lansia yang mengungkapkan bahwa pendamping jarang melakukan kunjungan kepada Lansia.

Pembahasan

Dari pemaparan hasil penelitian diatas, peneliti membahasnya berdasarkan jenis Lansia yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 04 tahun 2016 tentang perlindungan dan kesejahteraan lanjut yaitu Lansia potensial tidak mampu dan Lansia tidak potensial tidak mampu dengan menggunakan aspek dari model implementasi Grindle yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi.

Lansia Potensial Tidak Mampu

Dalam Perda No 04 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lansia menjelaskan mengenai pemberian bantuan sosial bagi Lansia potensial yang tidak mampu yaitu KUBE dan UEP, namun yang baru berjalan di Kota Bengkulu hanya UEP Lansia. Bantuan tersebut berupa bantuan modal usaha sebesar RP. 2.000.000 untuk 30 orang penerima bantuan. Untuk melihat dan mengetahui apakah program UEP Lansia berjalan dengan baik, maka peneliti akan membahas hasil penelitian berdasarkan aspek model implementasi dari Grindle yaitu isi kebijakan Menurut Grindle (Suparno, 2017:24) Implementasi kebijakan merupakan upaya yang harus dilakukan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara maksimal dan efisien. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, tujuan tersebut dijabarkan dalam program aksi dan berbagai kegiatan. Program aksi atau jenis bantuan yang diberikan kepada Lansia potensial yang tidak mampu berdasarkan Perda No 04 tahun 2016 pada pasal 31 yaitu usaha ekonomi produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Usaha ekonomi produktif merupakan jenis bantuan modal usaha yang diberikan kepada setiap Lansia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha sendiri dengan tujuan agar Lansia dapat memenuhi kebutuhannya dalam meningkatkan taraf kesehateraan. Sedangkan kelompok usaha bersama merupakan jenis bantuan yang diberikan kepada lansia berupa bantuan modal usaha yang kemudian dikelola oleh sekelompok Lansia yang telah memenuhi syarat. Namun dalam pelaksanaannya bantuan yang diberikan kepada Lansia pada tahun 2018 hanya UEP, Karena menurut TY pegawai Dinas Sosial Kota Bengkulu pemberian bantuan yang dianggarkan oleh pemerintah hanya UEP, selain itu Dinsos juga tidak mengajukan program KUBE dikarenakan terdapat hambatan karena jenis bantuan ini berupa kelompok usaha bersama maka akan sulit untuk membentuk KUBE karena sulit mengumpulkan Lansia yang membentuk usaha bersama.

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, diketahui bahwa tingkat perubahan kesejahteraan Lansia dengan adanya bantuan UEP Lansia masih dikatakan belum menunjukkan hal yang positif karena beberapa hal seperti pertama, pemberian bantuan diberikan kepada para Lansia yang telah memiliki usaha sehingga tidak mengurangi jumlah Lansia yang tidak bekerja, selain tidak mengurangi jumlah Lansia yang tidak bekerja dari pelaksanaannya juga tidak diberikan pelatihan atau pendampingan kepada para Lansia sehingga para Lansia penerima bantuan hanya memperoleh bantuan modal usaha namun tidak diberikan bekal untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berusaha. Sehingga berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan peneliti masih menemukan ada Lansia yang bekerja namun tidak sesuai dengan keahlian mereka sehingga dalam mengerjakan pekerjaannya masih sangat bergantung kepada orang lain, dan juga usaha yang Lansia jalankan tidak adanya inovasi, seperti penjual gorengan yang peneliti temui pada saat penelitian Lansia tersebut hanya menjual bakwan dan pisang goreng karena Lansia tersebut hanya bisa membuat bakwan dan pisang goreng. Seharusnya jika pihak Dinsos memberikan pelatihan maka Lansia tersebut dapat mengembangkannya yang akan berdampak positif pada apa yang Lansia jual bisa lebih berkembang. Yang kedua dalam pemanfaatan bantuan modal usaha, masih ada para Lansia yang menggunakan bantuan tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan. Ada Lansia yang memanfaatkan bantuan dengan hal lain dikarenakan ada kepentingan yang harus didahulukan dari pada mengembangkan usahanya. Seperti IN yang menggunakan bantuan UEP untuk membayar listrik rumah nya sehingga IN tidak bisa mengembangkan usaha yang dimiliki.

Sumber daya yang dilibatkan dalam hal ini peneliti memfokuskan pada kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan program UEP Lansia. Dalam pelaksanaan program UEP Lansia kualitas SDM sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa kualitas SDM yang ada di Dinsos saat ini belum menunjukkan kualitas yang baik hal tersebut diketahui dari jumlah uang yang diterima oleh Lansia yaitu sebesar RP. 1.950.000 yang seharusnya Lansia menerima bantuan sebesar RP. 2.000.000. Dari ketidaksesuaian jumlah uang yang diterima oleh Lansia menunjukkan bahwa pendamping dan Dinsos masih melakukan pungutan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Dinsos. Dengan adanya pungutan RP. 50.000 untuk setiap penerima bantuan menunjukkan kualitas SDM yang ada di Dinsos masih belum menunjukkan pelaksanaan program yang akuntabilitas dan jujur. Mengenai ketepatan alokasi dana yang tidak sesuai Sabatier

mengungkapkan bahwa untuk membuat suatu kebijakan berhasil salahsatu faktornya adalah ketepatan alokasi dana. Dari data diatas dapat diketahui bahwa pelaksana program masih melakukan kecurangan kecurangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberi layanan, karena masih terdapat pungutan liar yang dilakukan secara terbuka oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu.

Lansia Tidak Potensial dan Tidak Mampu

Dalam Perda No 04 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lansia dijelaskan bahwa Lansia yang menjadi perhatian pemerintah yaitu Lansia tidak potensial yang tidak mampu. Peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan perda tentang Lansia dalam meningkatkan kesejahteraan Lansia tidak potensial dengan menggunakan model implementasi Grindle yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi.

Lansia tidak potensial tidak mampu merupakan Lansia yang sudah tidak berdaya, miskin, tidak memiliki kemampuan baik fisik maupun ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak, dan tidak ada yang mengurus atau bergantung kepada orang lain. Di Kota Bengkulu pada tahun 2018 berdasarkan data dari Dinsos Lansia yang tidak mampu sebanyak 452 orang. Dalam rangka memberikan bantuan kepada Lansia tidak potensial pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinsos melaksanakan program ASLUT. Program ASLUT merupakan pemberian bantuan biaya hidup dan pemberian pendampingan sosial kepada Lansia. Di Kota Bengkulu jumlah penerima ASLUT sebanyak 105 orang Lansia, dengan jumlah bantuan yang diterima Lansia sebesar RP. 200.000/bulan.

Peneliti menemukan bahwa kebutuhan Lansia tidak hanya sekedar makan dan minum saja akan tetapi lebih dari itu, Lansia membutuhkan obat-obatan, dan juga pendampingan sosial sehingga mereka merasa tidak kesepian. Dalam implementasinya program ASLUT belum mampu memberikan manfaat yang lebih kepada Lansia karena menurut para Lansia dengan bantuan RP. 200.000 setiap bulan belum mampu mencukupi kebutuhannya sehingga mereka masih bergantung kepada keluarga atau kepada tetangga mengharapkan belas kasihan dari masyarakat. Selain dari Lansia hal serupa juga diungkapkan oleh keluarga Lansia yang menyatakan bahwa para Lansia dan keluarga belum terlalu merasakan manfaat dari bantuan yang ada.

Melalui program ASLUT pemerintah mengharapkan adanya pengurangan jumlah angka kemiskinan terutama pada penduduk usia tua atau Lansia. Pemerintah kota mengharapkan tidak ada lagi Lansia tidak potensial yang tidak mampu di Kota Bengkulu. Namun pada pelaksanaannya belum menunjukkan ke arah positif hal tersebut dibuktikan dengan data yang peneliti dapatkan dari Dinsos yang menyatakan bahwa angka Lansia penyandang masalah

kesejahteraan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 452 Lansia dari sebelumnya pada tahun 2017 sebanyak 315 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini belum optimal atau dapat dikatakan tidak berhasil karena peningkatan angka penyandang masalah kesejahteraan Lansia yang mengalami peningkatan. Selain data dari Dinsos peneliti juga melakukan observasi ke rumah Lansia penerima bantuan, di rumah Lansia peneliti menemukan bahwa ada Lansia yang tinggal tidak layak, Lansia hanya tinggal di dalam ruangan kecil dengan kasur yang sudah lapuk, dengan kondisi atap yang tidak menggunakan plafon dan tanpa ada kipas angin di dalam rumah Lansia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang peneliti lakukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 04 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia di Dinas Sosial Kota Bengkulu pada tanggal 5 Januari - 25 Januari 2019 peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi Perda tentang Lansia yang dilaksanakan di Dinsos belum optimal karena.

Lansia Potensial Tidak Mampu

1. Sasaran pemberian bantuan sosial dalam pelaksanaan Perda Lansia yaitu Lansia potensial yang tidak mampu.
2. Tujuan pemberian bantuan. Lansia belum merasakan manfaat yang diperoleh dari bantuan UEP Lansia, karena masih ada Lansia yang memanfaatkan bantuan dengan kepentingan lain dan penghasilan Lansia tidak mengalami peningkatan. Pemberian bantuan UEP Lansia belum optimal karena dari pemberian bantuan UEP, Lansia penerima bantuan tidak mengalami perubahan seperti perubahan jenis usaha atau pengembangan usaha, selain itu Lansia yang menerima bantuan juga bukan Lansia yang belum memiliki usaha sehingga jumlah Lansia potensial tidak mampu yang tidak memiliki usaha tidak mengalami perubahan.

3. Pelaksana program dan sumber daya yang dilibatkan. Dari kedua aspek tersebut dapat diketahui bahwa SDM yang menjadi pelaksana program belum melakukan tugasnya dengan baik dikarenakan masih ditemukan pemotongan besaran bantuan dari RP. 2.000.000 para Lansia hanya menerima sebesar RP. 1.950.000. Dan pendamping tidak mencari Lansia yang belum memiliki usaha serta tidak memberikan pelatihan kepada Lansia.
4. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu, belum optimal dalam menentukan penerima bantuan berdasarkan keahlian, keterampilan, bakat dan minat Lansia karena masih ada beberapa Lansia yang mengungkapkan bahwa mereka bekerja tidak sesuai dengan keahlian mereka. Selain itu juga penerima bantuan merupakan Lansia yang telah memiliki usaha, bukan Lansia yang belum memiliki usaha kemudian dibina untuk membuat usaha baru.

Lansia Tidak Potensial Tidak Mampu

Jenis bantuan. Dalam perda Lansia berkaitan dengan Lansia tidak potensial tidak mampu yaitu Lansia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga bergantung pada orang lain. Manfaat dari program ASLUT belum mampu memenuhi kebutuhan Lansia yang semakin banyak. Para Lansia tidak merasakan manfaat dari program ASLUT. Derajat Perubahan yang diharapkan dalam program ASLUT yaitu memenuhi kebutuhan, mendapatkan dampingan sosial dan peningkatan kesejahteraan bagi Lansia belum optimal karena Lansia dan keluarga masih merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan serta kondisi Lansia yang masih tinggal ditempat yang tidak layak. Kriteria dan tata cara pemberian bantuan. Letak dalam program ASLUT yaitu dilaksanakan oleh Kabid Resos dengan Kasi Resos Dinsos. Pelaksana Program dalam program ASLUT masih kurang memadai karena jumlah pendamping yang berjumlah 10 orang dengan jumlah Lansia sebanyak 105 orang, yang menyebabkan pekerjaan yang dilakukan pendamping tidak maksimal karena terlalu banyak Lansia dampingan. Sumber Daya yang di libatkan dalam hal pelaksanaan kebijakan Perda Lansia yaitu SDM yang berkualitas, namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM yang ada di Dinsos belum maksimal dibuktikan dengan tidak melakukan kunjungan ke rumah Lansia sesuai dengan buku pedoman yang telah ditetapkan

Saran

Lansia Potensial Tidak Mampu

- a. Dinas sosial melakukan pendataan secara merata dengan melibatkan kelurahan dan RT/RW
- b. Memberikan bantuan modal usaha kepada Lansia yang potensial namun belum memiliki usaha.
- c. Memberikan pelatihan kepada Lansia potensial tidak mampu

Lansia Tidak Potensial Tidak Mampu

- a. Meningkatkan peran pendamping Lansia.
- b. Menambah kuota penerima bantuan.
- c. Menambah jumlah besaran bantuan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Ali, Faried & Andi Syamsul. (2011). *Studi Kebijakan Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Aminudin, Achmad & Suratman. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik Dalam Perspektif Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Bengkulu: Jurusan Administrasi Publik.
- Creswell, W., John. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong, Arbani. (2007). *Teori Administrasi publik*. Makasar: CV Alfabeta.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIP

Efektivitas Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Bengkulu

Herman Ginting¹⁾; Marsidi²⁾

Study Program of Administration Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu

Email: ¹⁾ hermanginting2109@gmail.com ; ²⁾ marsidi0459@gmail.com ;

ARTICLE HISTORY

Received [29 Desember 2021]

Revised [18 Januari 2022]

Accepted [25 Januari 2022]

KEYWORDS

Efektivitas Pembinaan
Masyarakat
Narapidana
Pemasyarakatan

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Efektivitas Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Bengkulu. Dengan permasalahan awal yang diangkat oleh peneliti Minimnya fasilitas sarana dan prasarana bangunan, Over kapasitas pada jumlah warga binaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, terdiri dari Kasubsi Register 1 Orang, Petugas Pembinaan LPP 2 Orang, Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan 4 orang, Klien atau mantan warga binaan wajib lapor 3 orang, Petugas Balai Pemasyarakatan 2 orang. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas oleh mahmudi dengan aspek Input, Proses, Output, dan Outcome. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Efektivitas pembinaan yang ada di Lapas Perempuan sudah berjalan dengan efektif, Dimana diketahui tujuan dari pelaksanaan pembinaan untuk mendapatkan outcome telah tercapai. Dimana hasil akhir dari pembinaan telah membuktikan bahwa Warga binaan yang telah keluar dari Lembaga pemasyarakatan telah dapat diterima oleh masyarakat dan terutama oleh keluarga masing-masing. Hasil pembinaan yang telah diperoleh dapat dikembangkan oleh warga binaan.

ABSTRACT

Research purposes of this study was to see the effect of female prisoner orientation (WBP) in the Level IIB Women's Prison (LPP) in Bengkulu. With the original problem that the researcher raised. Inadequate facilities and infrastructure, excess number of people detained. The method used in this study is qualitative and descriptive, with data collection techniques namely observation, interview and documentation. The informants for this study were up to 12 people, including the Head of Subsidy Registration 1 person, 2 LPP Orientation Officers, corrections prisoners, clients or former prisoners to report 3 people. people, 2 employees of the Correctional Center. This study uses Mahmudi's efficiency theory with input, process, output and outcome aspects. From the research results, knowing the effectiveness of the training in the women's prison has gone well, and wherever we go, we know that the training objectives are successful. The end result of the training demonstrated that the prisoners released from the correctional facility were accepted by the community and especially their families. The results of the training obtained can be evaluated by the prisoners.

PENDAHULUAN

Hukum dibuat untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain. Manusia adalah makhluk sosial dimana akan ada interaksi dalam bermasyarakat. Dalam interaksi masyarakat ada aturan-aturan atau norma-norma yang berpengaruh pada perilaku anggota masyarakat tersebut demi ketertiban dan keserasian di dalam kehidupan bersama. Namun dalam kenyataannya banyak dalam masyarakat terjadi keadaan-keadaan yang membuat terjadi penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran aturan hukum di masyarakat, penyimpangan yang melanggar aturan hukum ini dapat disebut sebagai kejahatan atau kriminalitas

Perempuan memiliki potensi melakukan tindak kriminal dan dapat menjadi berkembang seperti pada kasus penyelupan narkoba berjenis ganja di dalam sel tahanan Lapas Kelas I Semarang yang sangat disayangkan, bagaimana seorang narapidana yang sudah berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) masih memiliki keinginan melakukan sebuah tindak kriminal. Hal ini dapat terjadi jika pelaku kejahatan sudah tidak memiliki rasa takut atau tanggung jawab pada hukum maka dari itu untuk mencegahnya harus ada antisipasi, agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan dan dapat memperbaiki diri untuk dapat melanjutkan hidup yang baik dan diterima di tengah masyarakat.

Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Didalam pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari

komponen-komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya

Adanya peningkatan jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Pengkulu hingga mengalami over kapasitas atau jumlah warga binaan perempuan telah melebihi kapasitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Begkulu. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah tahanan narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan diantaranya seperti sulitnya ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, dan harga kebutuhan hidup yang semakin meningkat, dan banyak lagi. Dari berbagai faktor tersebut menyebabkan banyak masyarakat tidak takut untuk melakukan tindakan kriminal dan tak jarang hal tersebut dapat dilakukan secara berulang. Untuk mengatasi peningkatan kriminal yang dilakukan oleh kaum perempuan perlu adanya program-program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan.

LANDASAN TEORI

Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Efektifitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan dengan ukuran-ukuran yang pasti. Efektif juga dapat disimpulkan sebagai suatu keadaan dan ukuran sejauh mana manfaat tercapainya tujuan yang telah tercapai.

Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa "efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa : "Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektifitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektifitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari masukan (input), dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personal, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978:77), yaitu :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perludijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektifitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektifitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang bernilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. *Output* merupakan segala sesuatu yang diharapkan

langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan atau program yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*) dan *outcome* merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.

Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang pemasyarakatan pengertian Lembaga Pemasyarakatan diatur pada pasal 1 angka 3 yaitu:

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi orang yang dihukum untuk dibina selama menjalani masa hukumannya.

Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah, batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah, batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Narapidana

istilah narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman, dengan kata lain istilah narapidana adalah untuk mereka yang telah divonis Hakim dan telah mempunyai

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2016) penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (atau lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting sosial* atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan tersebut karena permasalahan yang ada belum jelas, masih bersifat kompleks dan dinamis. Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan yang bertujuan untuk menggali efektivitas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Bengkulu. Dengan kata lain pendekatan penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat efektivitas pelaksanaan pembinaan WBP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

Fokus dan Aspek Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Bengkulu

Tabel 1. Aspek penelitian

Fokus	Aspek penelitian	Sub aspek
Efektivitas pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Bengkulu	1. Pendekatan Sumber (<i>resource approach</i>) Input	- Program pembinaan - Sarana prasana - Sumber Daya Manusia (Pembina)
	2. Pendekatan proses (<i>process approach</i>)	- Tahap I - Tahap II - Tahap III
	3. Pendekatan output	- Warga Binaan memperoleh pendidikan dan keterampilan
	4. Pendekatan Outcome	- Narapidana mampu bersosialisasi di masyarakat - Warga binaan mampu mengembangkan keterampilan yang dapat.

Sumber : Mahmudi (2015:86)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mendapatkan sumber data, baik primer maupun sekunder. Oleh karena itu untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini.

Wawancara

Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit/kecil.

Wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur dan dapat pula dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data lebih mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara semiterstruktur ini digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dan informan diminta mengemukakan pendapat dan ide-idenya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, serta pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2016).

Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2013). Kegiatan pengamatan pada objek penelitian ini dilakukan peneliti untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dari hasil pengamatan penulis mencatat, menganalisis, selanjutnya menarik kesimpulan tentang perilaku objek yang diamati. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu pada petugas, warga binaan pemsarakatan dan masyarakat yang berkunjung di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Bengkulu.

Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara melakukan pemilihan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, misalnya biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya film, gambar, dan lain-lain.

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini ialah seperti: diagram pengunjung per bulan, jumlah warga binaan yang dikunjungi, dan gambar atau tabel dari Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Bengkulu. Dokumen resmi yang didapat antara lain, data narapidana pertahun (data narapidana per kasusnya), jumlah pegawai, dan tupoksi Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Bengkulu.

Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive. Teknik purposive yaitu informan-informan yang peneliti tentukan dimana informan ini merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti, seperti pegawai Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Bengkulu, dan narapidana

Tabel 2. Deskripsi Informan

No.	Informan	Jumlah
1	Kasubsi register	1 Orang
2	Petugas Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Perempuan	2 Orang
3	Narapidana	4 Orang
4	Klien (mantan narapidana)	5 Orang
5	Petugas BAPAS	2 Orang
Jumlah		14 Orang

Sumber: Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini didapatkan melalui proses wawancara langsung dengan informan dan pihak lain yang dianggap masih berkaitan dengan penelitian, observasi langsung ke lokasi penelitian serta melihat referensi yang mendukung penelitian dan juga hasil penelitian sehingga dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang kemudian dideskripsikan kemudian dianalisis sehingga peneliti mendapatkan kesimpulan serta solusi yang relevan tentang Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Bengkulu.

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang, data dari informan-informan ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam saat melakukan penelitian. Wawancara dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda, dimana pada saat wawancara kepada petugas Lapas dan WBP, dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu pada saat waktu istirahat dan pada saat waktu proses pembinaan berlangsung. Untuk wawancara petugas Balai pemsarakat di lakukan di Balai pemsarakatan, dengan waktu yang ditetapkan pada saat waktu istirahat. Sementara wawancara untuk Klien/ mantan warga binaan dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda yakni di rumah klien masing-masing, dimana waktu penelitian disesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh Klien/ mantan warga binaan, mengingat bahwa Klien/mantan warga binaan sudah keluar dari lembaga pemsarakatan dan memiliki kesibukan masing-masing, dan tempat tinggal yang berbeda. Suasana pada saat berlangsungnya wawancara dengan setiap informan berlangsung secara alamiah, tidak dibuat-buat, apa adanya, dan tidak diatur oleh peneliti. Begitu juga dengan bahasa yang dilakukan berlangsung secara informal dengan isi wawancarayang berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh informan

Informan diambil adalah mereka yang berkaitan langsung, paham, dan mengerti bagaimana pembinaan yang ada di lembaga pemsarakatan perempuan kelas IIB Bengkulu yang dimana dalam pelaksanaannya terdapat dua bidang program yang dilakukan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, peneliti juga mengambil sebagian informan di luar lembaga pemsarakatan yaitu di balai pemsarakatan

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, selanjutnya peneliti memaparkan dan menjelaskan hasil wawancara, dokumentasi, dan informasi yang berkaitan langsung dengan aspek penelitian untuk menjawab rumusan masalah peneliti. Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu. Untuk menjawab hal tersebut peneliti menggunakan aspek-aspek penelitian meliputi pendekatan Input, pendekatan Proses, pendekatan Output, dan pendekatan Outcome. Sesuai dengan teori hubungan efektivitas yang dikemukakan Mahmudi (2015:86) mengatakan bahwa efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *Output*

dengan Tujuan. Semakin besar kontribusi *Output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *Input* dan efisiensi pada *Output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *Outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *Output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*.

Dengan ukuran efektivitas menurut Mahmudi (2015; 105) yaitu mengukur kesuksesan organisasi, program, atau aktivitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir suatu pelayanan dikaitkan dengan output-nya (*cost of outcome*). Pengukuran efektivitas tidak mungkin bisa dilakukan tanpa mengukur outcome. Suatu pelayanan mungkindiproduksi secara efisien akan tetapi tidak efektif karena tidak menambah nilai bagi pelanggan.

Dimana dapat dikatakan bahwa efektivitas yang diutamakan adalah hasil atau tujuan yang dikehendaki. Aspek pertama dalam penelitian ini adalah pendekatan Input, yaitu adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan Output. Input tersebut dapat berupa bahan baku untuk proses, orang (tenaga, keahlian, dan keterampilan), infrastruktur seperti gedung dan peralatan, teknologi (*hardware dan software*). *Input* dibagi menjadi dua, yaitu input primer dan input sekunder. *Input* primer adalah kas, sedangkan input sekunder adalah bahan baku, orang, infrastruktur, dan masukan lainnya yang digunakan untuk proses menghasilkan output. Input yang ada dikonsumsi atau digunakan oleh suatu proses dalam rangka menghasilkan output.

Melihat hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses pembinaan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan proses yang ada yaitu melalui tahapan I, tahapan II, dan tahapan III yang kemudian disesuaikan dengan input yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan telah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan. Namun sebesar apapun upaya yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan dalam memaksimalkan pembinaan masih belum dapat membuat pembinaan berjalan dengan maksimal dikarenakan input fasilitas dan SDM yang masih minim atau sangat kurang.

Berdasarkan hasil dari setiap wawancara dengan pegawai atau petugas Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan juga Klien atau mantan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap warga binaan sudah mampu mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga menyadari setiap kesalahannya, mendapatkan pendidikan hukum dan juga telah memiliki keterampilan, hal ini dapat disimpulkan bahwa warga binaan telah mendapat pendidikan kerohanian dan juga pendidikan hukum sehingga warga binaan mampu menyadari kesalahannya dan ingin dekat kepada Tuhan. Selain hal tersebut dari hasil wawancara tersebut juga dapat disimpulkan warga binaan pemasyarakatan perempuan kelas IIB telah mendapatkan pendidikan intelektual dan keterampilan dimana hampir seluruh warga binaan dan informan seluruhnya memiliki kualitas keterampilan. Melihat hasil tersebut maka output yang ingin dicapai oleh Lembaga pemasyarakatan telah terpenuhi dimana warga binaan telah memperoleh pendidikan dan keterampilan.

Warga Binaan Pemasyarakatan, dan juga Klien atau mantan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap warga binaan sudah mampu mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga menyadari setiap kesalahannya, mendapatkan pendidikan hukum dan juga telah memiliki keterampilan, hal ini dapat disimpulkan bahwa warga binaan telah mendapat pendidikan kerohanian dan juga pendidikan hukum sehingga warga binaan mampu menyadari kesalahannya dan ingin dekat kepada Tuhan. Selain hal tersebut dari hasil wawancara tersebut juga dapat disimpulkan warga binaan pemasyarakatan perempuan kelas IIB telah mendapatkan pendidikan intelektual dan keterampilan dimana hampir seluruh warga binaan dan informan seluruhnya memiliki kualitas keterampilan. Melihat hasil tersebut maka output yang ingin dicapai oleh Lembaga pemasyarakatan telah terpenuhi dimana warga binaan telah memperoleh pendidikan dan keterampilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Aspek input

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB masih mengalami kekurangan terutama fasilitas bangunan yang masih sangat minim, dimana program, sarana dan Prasarana, dan juga SDM masih belum maksimal selain hal tersebut Lapas Perempuan hanya memiliki satu blok dan semua kegiatan dilakukan dalam satu blok namun hal tersebut tidak mempengaruhi hasil outcome dari pembinaan.

2. Aspek Proses

Dalam Proses pembinaan memiliki tahapan yang saling terkait di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu sudah sesuai dengan tahapan dan pedoman yang berlaku yaitu tahapan I, Tahapan II, Tahapan III, diketahui juga bahwa terdapat kendala dalam pembinaan

kemandirian dikarenakan minimnya fasilitas yang ada.

3. Aspek Output

Warga binaan telah mendapatkan pembinaan Kepribadian dan Kemandirian baik yang masih berada di dalam dan yang telah keluar dari Lembaga Pemasarakatan Pemasarakatan Perempuan kelas IIB Bengkulu.

4. Aspek Outcome

Warga binaan yang telah keluar dari Lembaga pemasarakatan telah dapat diterima oleh masyarakat dan terutama oleh keluarga masing-masing. Pembinaan yang telah diperoleh dan di dapat selama berada di lembaga pemasarakatan baik itu pembinaan kepribadian dan juga pembinaan kemandirian tetap dilakukan dan telah dikembangkan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diketahui pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan sudah berjalan secara Efektif . Dimana diketahui tujuandari pelaksanaan pembinaan untuk mendapatkan outcome telah tercapai

Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah untuk dapat mengatur agar lebih banyak lagi lembaga atau instansi-instansi yang terkait untuk dapat membantu pembinaan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan sehingga dapat mengurangi beban Lembaga Pemasarakatan Perempuan
2. Diharapkan untuk tercapainya tujuan pembinaan dengan baik maka ada pula pengoptimalan pada pelaksanaan program pembinaannya agar wargabinaan memperoleh pembinaan yang baik.
3. Diharapkan pada pihak Lembaga Pemasarakatan Perempuan dapat menambah Program dalam pembinaan Kepribadian dan Kemandirian sehingga seluruh warga binaan dapat mengikuti pembinaan sesuai dengan minat masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2017, *Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (Proposal, Skripsi dan Jurnal)*, FISIP UNIB, Bengkulu.

Erdina, Chien Chie Lia. 2018. *Efektivitas Pembinaan Anak Didik di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas IIA Bengkulu*. FISIP UNIB, Bengkulu.

Handyaningrat, Suwarno. 1994. *Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Maanagement*. Jakarta: CV Haji Massagung .

Hidayat. 1986. *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : Gajah madaUniversity Press.

Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan

Lubis, Hari S.B. dan Martani Huseini. 1987 *Teori Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara

Mahnudi, 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Steers , M, Richard, 1985, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta.

Suparlan, Y, 1990, *Kamus Istilah Kesejahteraan Sosial*, Pustaka Pengarang, Yogyakarta.

Siagian, Sondang P. 1978. *Peranan Staf dalam Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung Steers,

Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Alih Bahasa : Magdalena Jamin, Dra. Jakarta : Erlangga.

Tyson, Shaun dan Tony Jackson, 2000, *Perilaku Organisasi*, Andi and PersonEducasion Asia Pte Ltd, Yogyakarta.

Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Dalam Memberikan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Bengkulu

Askani¹⁾; Salehan²⁾ ;

^{1,2)} *Study Program of Administration Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu*

Email: ¹⁾ askanistia1@gmail.com; ²⁾ drs.salehanbadi@gmail.com ;

ARTICLE HISTORY

Received [29 Desember 2021]

Revised [18 Januari 2022]

Accepted [25 Januari 2022]

KEYWORDS

Kinerja, Pelayanan

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) kota Bengkulu dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, informan peneliti dalam penelitian ini yakni kepala dinas, kepala bidang, staf dan pemohon pembuatan izin mendirikan bangunan kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan kota Bengkulu sudah baik. (1) Dimensi kuantitas dilihat dari hasil kerja pegawai dalam menggunakan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaannya. (2) Dimensi kualitas dilihat dari cara pegawai melakukan pelayanan serta keahlian pegawai dalam menyelesaikan tugas menggunakan komputer serta dibuktikan dengan adanya piagam diklat yang pernah mereka ikuti. (3) Dimensi ketepatan waktu dapat dilihat dari absensi pegawai, baik absensi pagi, siang dan sore. Kendala yang terjadi dalam pembuatan izin mendirikan bangunan ini kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pemberian izin mendirikan bangunan serta baner yang menjelaskan contoh yang tepat atau gambar sketsa bangunan yang ingin didirikan oleh pemohon. Namun walaupun demikian pegawai atau staf izin mendirikan bangunan kota Bengkulu selalu berusaha dengan sebaik mungkin dalam menjalankan kewajibannya.

ABSTRACT

This study aims to determine the performance of Bengkulu City Investment and One Stop Service (DPMPSTP) in granting construction permits. The study design used in this study is a descriptive qualitative study. The researcher served as the primary instrument, the informants for this study were the department heads, department heads, staff and permit applicants for the construction of buildings in Bengkulu City. Data collection techniques were performed by interviews, observations, and documentation. Data analysis uses Miles and Huberman's descriptive analysis techniques, which involve data minimization, presentation, and drawing conclusions. Check data validity using source triangulation. The results of this study indicate that the performance of the investment office and general services in issuing construction permits for Bengkulu city is good. (1) Quantitative direction of the worker's work using a certain time and a certain speed to complete the work. (2) The quality dimension is reflected in the way in which the staff provide services and the employee's expertise in performing IT tasks and is concretized by the training charter in which they have attended. (3) Time dimensions are reflected in employee engagement, morning, afternoon, and evening. The constraint that arose in obtaining planning permission for this building was the lack of facilities and supporting infrastructure to grant planning permission for the building as well as a banner explaining an exact example or sketch of the building. the building you want to build. Even so, however, Bengkulu City's officers or employees who have authorized the construction of buildings will do their best to fulfill their obligations.

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan salah satu unsur yang penting dalam berdirinya suatu Negara. Seperti Indonesia salah satunya, dengan adanya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan mewakili rakyat dalam mengurus tugas Negara ini, Salah satu fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan sebagai bentuk dari tugas umum pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan efektif dan berkeadilan.

Transparan dan akuntabel. Hal ini berarti untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, aspiratif dan memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap masyarakat yang dilayani agar masyarakat pengguna jasa merasa puas terhadap pelayanan yang diterimanya.

Kinerja birokrasi pada saat ini merupakan topik pembicaraan yang tiada hentinya untuk dikritisasi, hal tersebut karena kinerja aparatur Negara yang dirasakan kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dapat dengan mudah dibuktikan dengan di mana tuntutan pelayanan publik sebagaitanda ketidakpuasan mereka sehari-hari yang sering kita lihat. Harus diakui, bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaharuan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian, pembaruan dilihat dari kedua sisi tersebut belumlah memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka Pelayanan.

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategi planning* suatu organisasi. Kinerja biasanya diketahui apabila individu atau organisasi tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria keberhasilan itu misalnya berupa tujuan-tujuan atau target kinerja individu atau organisasi tersebut tidak ada tolak ukur antara harapan dengan pencapaian dari tujuan itu sendiri.

Salah Satu fungsi pemerintahan yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum. Sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan, untuk mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yaitu efisien, efektif, adil, transparan, dan akuntabel Pada dasarnya bentuk pelayanan di Indonesia masih sangatlah buruk dikarenakan proses birokrasi itu sendiri yang sangat berbelit-belit, ketidakefisienan dan efektifitas kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya merupakan salah satu faktor penghambat dalam memberikan bentuk pelayanan publik. Pelayanan dapat dikatakan baik, apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kepuasan pelanggan, dan kepuasan tersebut akan tercapainya apabila pelayanan yang mereka terima dapat melebihi apa yang mereka dapatkan.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar kepada ketidakpuasan. Hal tersebut dapat mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja yang diselenggarakan oleh para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat agar dapat bekerja sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Pengukuran tersebut akan melibatkan seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, tidak jelas besar/kecilnya biaya yang harus dibayarkan, persyaratan yang tidak jelas, tidak transparan, sikap petugas yang tidak ramah, kurang responsive dan lain-lain, adalah gambaran kondisi penyelenggaraan pelayanan publik saat ini yang masih belum memadai. Gambaran pelayanan publik tersebut adalah merupakan keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa.

Menurut Ismail Mohamad (2003:2), permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa "pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain kurang responsif, kurang informatif, kurang *accessible*, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, dan *in-efisien*." Dari sekian banyak pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, diantaranya adalah pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB). Memiliki IMB merupakan hal yang sangat penting dan urgen. Bila tidak memiliki IMB, maka bangunan yang didirikan dianggap bangunan "liar" dan tidak legal. Oleh karenanya, pemerintah daerah berhak untuk menghentikan proses pembangunan tersebut dan jika bangunan tersebut telah didirikan, tetapi tidak memiliki IMB, maka pemerintah daerah pun berhak untuk merobohkan bangunan tersebut. Sudah sangat sering media memberitakan bagaimana polisi pamong praja (Pol-PP) menghancurkan atau merobohkan.

Beberapa faktor yang sering kali mempengaruhi kurang memuaskan pelayanan yang diberikan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Bengkulu. Seperti kurang adanya ketepatan dan kepastian waktu yang ditetapkan dalam pembuatan surat perizinan tersebut yang tidak sama halnya dengan standar yang telah ditetapkan.

Ketika kondisi sudah seperti ini maka pihak mana yang dipersalahkan untuk mencapai tujuan yakni memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, salah satunya dalam pemberian surat izin mendirikan bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu. Dengan adanya meningkatkan kinerja dalam memberikan izin mendirikan bangunan. Dan terwujudnya ketepatan waktu dalam pemberian pelayanan yang baik dari pegawai pada masyarakat penerima layanan serta komunikasi yang terjalin baik dalam rangka layanan prima sehingga memperbaiki paradigma yang kurang baik akan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Bengkulu. Dengan adanya meningkatkan kinerja dalam memberikan izin mendirikan, selain itu memberikan pengarahan sehingga manfaat/pengurusan suarat izin dapat dirasakan dan benar-benar memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat tersebut.

LANDASAN TEORI

Dalam sebuah penelitian ilmiah, dapat teruji kebenarannya berdasarkan dukungan dari ilmu pengetahuan sebagai landasan penelitian yang disusun dalam sebuah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah uraian tentang teori-teori yang relevan dapat digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Dalam Bab ini di uraikan secara rinci mengenai sejumlah teori yang menjadi dasardigunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan dalam penelitian. Bab ini terdapat pembahasan mengenai konsep pelayanan publik, indikator kinerja, faktor yang mempengaruhi kinerja serta kerangka pikir penelitian.

Pelayanan Publik

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu memiliki suatu tugas dan fungsi, salah satunya pelayanan menurut Moenir (2010: 26), pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Berbeda dengan Supranto (2006:227) mengatakan bahwa pelayanan atau jasa merupakan suatu kinerja penampilan, tidak terwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengonsumsi jasa tersebut. Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara langsung dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas pemerintah. Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual maupun kelompok. Pelayanan publik memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini dikarenakan tidak semua jasa atau pelayanan disediakan oleh pihak swasta, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang tidakdisediakan swasta tersebut.

Menurut pendapat lainnya yang disampaikan oleh Sinambela (2011:5),bahwasannya pelayanan publik adalah sebagai berikut ini:

“Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.

Sedangkan di dalam Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 16 perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun asas-asas pelayanan publik yang termuat dalam undang-undang tersebut meliputi:

1. Kepentingan umum Yaitu pemberian pelayanan tidak bolehmengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan.
2. Kepastian hukum Yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Kesamaan hak Yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Keseimbangan hak dan kewajibanYaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. KeprofesionalanYaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. Partisipatif Yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif Yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
8. Keterbukaan Yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Akuntabilitas Yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompokrentan, yaitu pemberiankemudahan terhadap kelompok

rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

11. Ketepatan waktu Yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepatwaktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan Yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Berdasarkan definisi di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian proses atau usaha yang dilakukan perorangan maupun instansi publik untuk usaha memenuhi kepentingan oranglain/ masyarakat umumnya.

Menurut Ibrahim (2008:22), kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut. Sedangkan menurut Tjiptono (1995:25) ciri-ciri atau atribut-atribut yang ikut menentukan kualitas pelayanan publik adalah:

- (1) Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses;
- (2) Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan;
- (3) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;
- (4) Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer;
- (5) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain;
- (6) Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu bertitik tolak dari teori yang dikembangkan oleh Zeithaml dkk. (2010:2) bahwa kualitas pelayanan ditentukan oleh lima dimensi, yaitu *tangibel, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy*.

Dimensi ini mencakup hal-hal sebagai berikut: penampilan fisik dari aparatur, fasilitas, peralatan dan sarana komunikasi dan informasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu yang dimanfaatkan dalam melaksanakan pelayanan IMB kepada seluruh masyarakat kota Palembang yang bangunan rumahnya wajib memiliki IMB. Dimensi *tangibel* ditentukan oleh indikator-indikator; yaitu penampilan aparatur saat melaksanakan tugas, kenyamanan sarana pelayanan, kemudahan memenuhi persyaratan pengurusan IMB, kedisiplinan aparatur dalam pelayanan, kemudahan akses menjangkau lokasi pelayanan, dan penggunaan alat bantu komputer dalam pelayanan IMB.

Menurut Saefullah (2008:28), untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik perlu ada upaya untuk memahami sikap dan perubahan kepentingan publik sendiri. Perubahan kehidupan dunia yang begitu cepat mempunyai pengaruh yang cepat pula terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat secara umum. Selain itu, menurut Thoha (2008:19), dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis, birokrasi publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (*revitalisasi*) dalam memberikan pelayanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah

menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaboratis dan dialogis dan dari caracara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis.

Di dalam Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, terdapat tiga kelompok dalam ruang lingkup pelayanan publik meliputi:

1. Pelayanan barang publik
2. Pelayanan atas jasa publik
3. Pelayanan administratif adalah tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Selain itu tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Dari uraian undang-undang diatas dapat dilihat bahwasanya pelayan tersebut memiliki bagaiannya asalah satu diantaranya adalah pelayan administratif termasuk pelayanan dalam memberikan izin mendirikan bangunan bagi masyarakat diwilayahnya. Sehingga perlu adanya kinerja yang baik dalam pihak pemberi layanan untuk dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

Kinerja

Tekanan terhadap organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah adalah memperbaiki kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dengan efektif dan efisien dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Menurut Wibowo (2008:7), kinerja berasal dari pengertian performance yaitu sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja berkaitan dengan melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari suatu pekerjaan. Selain itu menurut Amstrong dan Baron dalam (Wibowo 2008:7), kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuanstrategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi padaekonomi.

Sedangkan menurut Mahsun (2006:25), beliau berpendapat tentang kinerja merupakan sebagai berikut ini:

“Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategis planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu mempunyai “

Menurut pendapat Ilyas (2005:55) mengatakan bahwa pengertian kinerja adalah penampilan, hasil karya personil baik kualitas, maupun kuantitas penampilan individu maupun kelompok kerja personil, penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memegang jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.

Menurut Moeheriono (2012:95) menyatakan kinerja adalah

“Kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakandalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi”

Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Jika dikaitkan dengan kinerja sebagai kata benda di mana salah satu entrinya adalah hasil dari sesuatu pekerjaan pengertian kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang oleh suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral atau etika. (Rival, Basri, 2005: 15)

Kinerja menurut Stephen Robbins yang diterjemahkan oleh Harbani Pasolong “Kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan di bandingkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, (Pasolong, 2007:176). Kinerja adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam menjalankan misi yang dimilikinya yang dapat diukur dari tingkat produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, res ponsibilitas, dan akuntabilitas (Tangkilisan, 2005:178)

Sinambela (2012: 5-6) selanjutnya menjelaskan bahwa kinerja Sinambela juga mengajukan empat elemen yang terkandung dalam kinerja :

1. Hasil kerja yang dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti bahwa kinerja tersebut adalah "hasil akhir" yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau berkelompok.
2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk bertindak sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. Meskipun demikian orang atau lembaga tersebut tetap harus dalam kendali, yakni mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pemberi hak dan wewenang, sehingga dia tidak akan menyalahgunakan hak dan wewenangnya tersebut.
3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas-tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
4. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai dengan moral dan etika yang berlaku umum.

Pengukuran kinerja menurut Simamora (2004:50) adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Menurut Dharma (2004:355) pengukuran kinerja harus mempertimbangkan hal-hal diantaranya. Sebagai berikut ini:

“Pertama Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan harus dicapai. Kedua Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik atau tidaknya). Ketiga Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan”.

Sebagai kesimpulan dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pengertian kinerja bisa meliputi kinerja suatu kelompok atau organisasi, atau kinerja individual. Dalam kasus kinerja organisasi (dimana organisasi tersebut bisa berupa perusahaan, instansi pemerintah, lembaga publik non pemerintah, LSM, kelompok masyarakat dan lain-lain), maka kinerja organisasi sebenarnya ditopang oleh kinerja individual masing-masing anggota organisasi yang secara keseluruhan membangun kinerja organisasi.

Indikator Kinerja

Penilaian kinerja organisasi harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang baik dan benar. Menurut Mahsun, (2006:26) terdapat empat elemen pengukuran kinerja organisasi yaitu: 1) menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi; 2) merumuskan indikator dan ukuran kinerja; 3) mengukur tingkat

ketercapaian 20 tujuan dan sasaran-sasaran organisasi; 4) evaluasi kinerja (umpan balik, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas).

Lebih lanjut menurut Mahsun (2006:26),

“Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.”

Pengukuran kinerja bukan tujuan akhir melainkan merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja akan memberi tahu kita apa yang telah terjadi bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan. Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen, baik organisasi publik maupun swasta. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan.

Menurut Mahmudi (2015:14), tujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor publik yaitu:

- a. mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- b. menyediakan sarana pembelajaran pegawai
- c. memperbaiki kinerja periode berikutnya
- d. memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan, pemberian reward dan punishment
- e. memotivasi pegawai
- f. menciptakan akuntabilitas publik

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu cara untuk mengetahui atau menilai sejauh mana tujuan, sasaran dan program dari suatu organisasi bisa tercapai. Pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Sementara itu, menurut Palmer dalam Mahsun (2006:78) jenis indikator kinerja Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Indikator biaya (biaya total, biaya unit)
- b. Indikator produktivitas (jumlah pekerjaan yang mampu dikerjakan pegawai dalam jangka waktu tertentu)
- c. Tingkat penggunaan (sejauhmana layanan yang tersedia digunakan)
- d. Target waktu (waktu rata-rata yang digunakan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan)
- e. Volume pelayanan (perkiraan atas tingkat volume pekerjaan yang harus diselesaikan pegawai).
- f. Kebutuhan pelanggan (jumlah volume pelayanan yang disediakan dibandingkan dengan volume permintaan yang potensial)
- g. Indikator kualitas pelayanan
- h. Indikator kepuasan pelanggan.
- i. Indikator pencapaian tujuan

Menurut Mahmudi (2015:154), indikator kinerja yang baik memiliki sifat memotivasi dan mengarahkan untuk mencapai hasil terbaik. Dalam hal ini fungsi indikator kinerja adalah sebagai alat untuk perbaikan bukan pengendalian. Indikator kinerja bukan seperti mikroskop yang digunakan untuk mencari dan mengamati elemen-elemen tersembunyi yang tidak tampak dalam suatu kehidupan organisasi, tetapi indikator kinerja tersebut merupakan cermin bagi organisasi untuk merefleksikan berbagai aspek aktivitas organisasi. Pihak luar akan melihat organisasi dari cermin tersebut. Sementara pihak internal organisasi harus memastikan bahwa indikator kinerja yang dibuat tidak menimbulkan gambaran kinerja yang terdistorsi dan bias sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang semestinya.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja merupakan sarana untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan organisasi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas serta untuk mengevaluasi dan memantau kinerja organisasi. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja DPMPSTP dalam memberikan pelayanan IMB Kota Bengkulu yaitu indikator yang dikemukakan oleh Dharma (2004:24). Adapun indikator tersebut yaitu: Kuantitas, Kualitas, dan Kinerja. Melalui indikator tersebut diharapkan dapat menilai kinerja.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang banyak melibatkan langsung peneliti kedalam subjek yang akan diteliti. Pada penelitian ini tidak menguji hipotesis karena yang dilakukan adalah menggambarkan secara jelas apa yang peneliti temukan dilapangan. Banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi dan itu semua akan menambah kekayaan dan kedalaman dari hasil penelitian.

Tabel 1. Desain Penelitian

No	Desain	Uraian
1.	Masalah Penelitian	Kurang optimalnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Bengkulu
2.	Jenis Penelitian	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yakni memahami permasalahan berdasarkan fakta yang terjadi dilokasi penelitian.
3.	Fokus Penelitian	kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Bengkulu
5.	Informan Penelitian	Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> yakni informan yang dijadikan narasumber/partisipan dianggap mengerti dan memahami mengenai permasalahan yang sedang diteliti seperti pihak dari DPMPTSP, selain itu juga dari masyarakat yang memperoleh pelayanan dalam mengurus IMB
6.	Teknik Pengumpulan Data	Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara: 1. Wawancara, peneliti melakukan percakapan langsung dengan narasumber, melalui catatan tertulis atau melalui perekam audio tape dan pengambilan foto. 2. Observasi, yang dilakukan kelapangan yakni di dinas tenaga kerja, unsur buruh dan perusahaan itu sendiri, untuk melihat fakta dilapangan tentang bagaimana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Bengkulu 3. Dokumentasi, seperti undang- undang dan dasar hukum, data Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu, data badan pusat statistik (BPS) Kota Bengkulu, jurnal ilmiah, buku-buku dan dokumen arsip.
7	Tim Peneliti	Peneliti terdiri dari satu orang yaitu mahasiswa yang bersangkutan yang sedang menyusun skripsi dengan judul ini.
8.	Teknik Analisis Data	Analisis data yang digunakan untuk mengetahui kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Bengkulu yakni teknik dengan menggunakan teori teknik analisis data deskriptif model Miles dan Huberman.

Sumber : Modifikasi Peneliti 2018

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam penelitian terkait dengan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan bagi masyarakat kota Bengkulu, penulis menggunakan 3 aspek penelitian yang diadopsi dari teori Palmer dalam Mahsun (2006:78) tentang indikator pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB), sebagai alat ukur dalam menganalisis kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu. Ketiga aspek penelitian tersebut berisi 3 alat ukur yang digunakan untuk melihat kinerja tersebut, adapun ketiga aspek ini, yaitu :

1. Kuantitas
2. Kualitas
3. Ketepatan waktu

Selain itu standar pelayan pengurusan izin mendirikan bangunan pembangunan dan izin bangunan kota Bengkulu berdasarkan peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri sipil. Tujuan dari penilaian kerja ini untuk melihat keberhasilan atau tidaknya seorang pegawai dan

untuk memenuhi kekurangan-kekurangan pegawai oleh pegawai yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut demi meningkatnya kualitas dan kuantitas pegawai dalam memberikan pelayanan.

Dengan menggunakan peraturan dan aspek penelitian, penulis dapat menjadikannya sebagai acuan dengan melihat bagaimana kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang ingin memperoleh izin mendirikan bangunan khususnya di wilayah kota Bengkulu. Adapun hasil penelitian yang telah ditemui terkait ketiga aspek yang digunakan, yaitu :

Kuantitas Kerja

Kuantitas Kerja dalam artian jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks kinerja Pegawai DPM-PTSP di Bidang IMB, Jumlah Kerjayang dilaksanakan adalah sebuah acuan tercapai atau tidaknya target yang di tentukan oleh pimpinan kepada stafnya, juga penggunaan waktu yang efektif dalam sebuah pekerjaan, serta pembagian beban kerja. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan langsung yang peneliti lakukan disimpulkan bahwa kuantitas kerja staf pegawai di Perizinan IMB DPM-PTSP Kota Bengkulu sudah berjalاندengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kualitas Kerja Pegawai

Untuk dapat melihat kinerja dari pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu dapat dilihat dari kualitas layanan yang diberikan yakni hal tersebut mencocokkan penilaian pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan. Kualitas layanan tersebut terlihat dari banyak atau tidaknya keluhan dari para pengguna jasa, kemudahan pelanggan (DPMPTSP) Kota Bengkulu dalam mendapatkan informasi serta kemampuan petugas dalam menjelaskan informasi secara jelas pada masyarakat tentang syarat dalam pengajuan permohonan mendapat Penerbitan ijin. Penggunaan jasa yakni pemohon ijin DPMPTSP Kota Bengkulu, akan merasa puas jika pelayanan yang diberikan sesuai yang diberikan dengan yang diharapkan oleh setiap mereka yang datang ke DPMPTSP Kota Bengkulu, khususnya dalam rangka mendapatkan IMB tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan mengikutsertakan mereka pada kegiatan pelatihan-pelatihan atau diklat-diklat khusus sesuai dengan bidang masing-masing.

Ketepatan Waktu

Untuk dapat mengetahui kedisiplinan waktu pegawai Perizinan IMB DPM-PTSP Kota Bengkulu dapat dilihat dari absensi pegawai setiap harinya, dan ketepatan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka. Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pegawai di IMB ini sudah menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu.

PEMBAHASAN

Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Dalam Memberikan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Bengkulu

Kinerja merupakan hasil atau tingkatan keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama priode tertentu didalam melaksanakan dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran, atau kreteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama. Sedangkan kinerja dalam pemberian pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) yang ada di DPM-PTSP di kota Bengkulu merupakan bagian dari program pemerintah kota, hal ini dilandaskan pada upaya mengatur berbagai kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat agar tertib dan terkendali sesuai ketentuan intensitas bangunan, meliputi garis sepadan bangunan, , kuefisien dasar bangunan (KDB), dan ketinggian bangunan. Adapun fungsinya selaku publik service, yaitu untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan sehingga masyarakat akan memperoleh kepastian hukum atas bangunan yang didirikannya (Suparman, 2002:6).

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai Dinas DPM-PTSP dalam memberikan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bengkulu adalah teori dari Palmer dalam Mahsun (2006:78) tentang indikator pengukuran kinerja. Ketiga aspek pengukuran tersebut berisi 3 alat ukur yang digunakan untuk melihat kinerja tersebut, adapun ketiga aspek ini, yaitu :

Kuantitas Kerja Pegawai

Kuantitas Kerja dalam artian jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.

Hasil kerja pegawai DPMP-PTSP menurut masyarakat dan pengguna layanan sudah baik, karena pegawai sudah berkerja atau melakukan pekerjaannya sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan, misalnya datang ke kantor sebelumjam 08.00 WIB, ikut apel pagi, dan pulang jam 16.00 WIB. Menurut Wungu dan Brotharsojo (2003:56) bahwa:

“Quantity (kuantitas) adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka”.

Sedangkan menurut Wilson dan Heyyel (1987:101) mengatakan bahwa:

“*Quantity of Work* (kuantitas kerja) adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam suatu periode tertentu. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.”

Dengan demikian kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja dan penggunaan waktu. Jumlah kerja adalah banyaknya tugas pekerjaannya, dapat dikerjakan. Penggunaan waktu adalah banyaknya waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan, maka dapat disimpulkan bahwa kuantitas kinerja Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Dalam Memberikan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Bengkulu sudah baik.

Kualitas Kerja Pegawai

Kualitas kinerja adalah mutu seorang karyawan atau pegawai dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya meliputi kesesuaian, kerapian, dan kelengkapan, *wilson dan heyel (1987)*. Kesesuaian yang dimaksud di sini adalah kesesuaian dalam melaksanakan pekerjaan, artinya adanya kesesuaian antara rencana kerja dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kerapian adalah kerapian dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Kelengkapan adalah kelengkapan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaannya.

Kualitas kerja mengacu pada kualitas sumber daya manusia (Matutina,2001:205), kualitas sumber daya manusia mengacu pada :

1. Pengetahuan (Knowledge) yaitu kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi pada intelegensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan.
2. Keterampilan (Skill), kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang tertentu yang dimiliki karyawan.
3. Abilities yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang karyawan yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab.

Hasibuan (2007:87) menyatakan : “Penilaian adalah kegiatan manajemen untuk mengevaluasi perilaku dan hasil kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya.” Dua hal yang dievaluasi dalam menilai kinerja karyawan berdasarkan definisi diatas yaitu perilaku dan kualitas kerja karyawan. Yang dimaksud dengan penilaian perilaku yaitu kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi dan partisipasi karyawan. Sedangkan kualitas kerja adalah suatu standar fisik yang diukur karena hasil kerja yang dilakukan atau dilaksanakan karyawan atas tugas-tugasnya.

Flippo (1995:28) berpendapat tentang kualitas kerja sebagai berikut: “Meskipun setiap organisasi berbeda pandangan tentang standar dari kualitas kerja pegawai, tetapi pada intinya efektifitas dan efisiensi menjadi ukuran yang umum.”

Bertitik tolak dari definisi yang diberikan oleh Flippo (1995:28) tersebut maka dapat dikatakan bahwa inti dari kualitas kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna.

Kualitas sumber daya manusia memiliki manfaat ditinjau dari pengembangan perusahaan yaitu:

1. Perbaikan kinerja.
2. Penyesuaian kompensasi.
3. Keputusan penempatan.
4. Kebutuhan pelatihan.
5. Perencanaan dan pengembangan karier.
6. Efisiensi proses penempatan staf.
7. Kesempatan kerja yang sama.

Bitner dan Zeithaml (dalam Riorini, 2004:22) menyatakan untuk dapat meningkatkan performance quality (kualitas kerja) ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan memberikan pelatihan atau training, memberikan insentive atau bonus dan mengaplikasikan atau menerapkan teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja. Sunu (dalam

Flippo, 1995:91) menyatakan bahwa penting untuk menciptakan lingkungan untuk meningkatkan kualitas kerja, yaitu:

1. Tanggung jawab dan kepentingan pimpinan untuk menciptakan lingkungan peningkatan kualitas.
2. Nilai, sikap dan perilaku yang disetujui bersama diperlukan untuk meningkatkan mutu.
3. Sasaran peningkatan kualitas yang diterapkan oleh organisasi.
4. Komunikasi terbuka dan kerja sama tim baik.
5. Pengakuan dapat mendorong tindakan yang sesuai dengan nilai, sikap dan perilaku untuk meningkatkan mutu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas kinerja pegawai di Perizinan IMB DPM-PTSP Kota Bengkulu baik, mereka menguasai apa yang mereka kerjakan dan melakukan pelayanan yang sangat baik serta penjelasan yang sangat mudah dipahami oleh pemohon IMB, hal tersebut didukung juga dengan seringnya mereka mengikuti diklat-diklat sehingga kinerja pegawai semakin membaik.

Ketepatan waktu

Seorang pegawai negeri atau yang dikenal sekarang dengan istilah Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Adanya pandangan miring tentang kinerja atau prestasi kerja PNS yang rendah menjadi tantangan bagi kita selaku aparatur Negara untuk meningkatkan citra di mata masyarakat dengan meningkatkan prestasi kerja yang salah satunya dapat dicapai melalui pengelolaan atau manajemen waktu yang tepat.

Kemampuan untuk mengatur waktu kerja yang hanya 7,5 jam sehari selama 5 hari kerja dalam seminggu itu dengan efektif dan efisien akan membawa kesuksesan bagi seorang pegawai. Seorang pegawai harus bisa menghindari faktor-faktor eksternal yang dapat mengganggu produktifitasnya dalam bekerja. Banyaknya waktu yang terbuang dengan percuma akan berdampak terhadap kinerja yang dicapai. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai dalam me-manage waktu kerjanya, antara lain :

- a) Membuat agenda harian
- b) Disiplin waktu
- c) Mengoptimalkan kualitas pengisian waktu
- d) Membuat prioritas pekerjaan
- e) Tidak menunda-nunda pekerjaan
- f) Mengurangi kebiasaan membuang waktu
- g) Efektif dalam memanfaatkan waktu

Masih banyak lagi langkah yang dapat dilakukan oleh seorang pegawai dalam mengelola waktu untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Yang terpenting ialah mampu mengatur satu detik dari waktunya untuk bisa melakukan hal yang bermanfaat untuk hidup dan pekerjaannya. Waktu adalah hal yang sangat berarti dalam kehidupan. Waktu merupakan sarana untuk melakukan dan menyelesaikan banyak hal. Untuk itu waktu harus dimanfaatkan sebaik mungkin, agar waktu tidak berjalan dengan percuma. Untuk itu dibutuhkan suatu pengelolaan atau manajemen waktu yang tepat.

Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Waktu menjadi salah satu sumber daya unjuk kerja. Sumber daya yang mesti dikelola secara efektif dan efisien, agar dapat dicapai hasil kerja yang maksimal. Manajemen waktu menjadi salah satu keterampilan penting yang harus kita pelajari dalam dunia kerja. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu merupakan sesuatu yang diharapkan dari semua pegawai, yang hanya dapat dicapai jika waktu dikelola secara cerdas dan efisien. Manajemen waktu yang tepat dapat meningkatkan kualitas kerja dari seorang pegawai yang nantinya akan berdampak terhadap kinerja atau prestasi kerja yang bersangkutan. Peningkatan prestasi kerja seorang PNS sebagai abdi masyarakat sangat dinanti-nanti oleh masyarakat secara umum, sehubungan dengan pelayanan yang diberikan.

Begitu juga dengan pegawai DPM-PTSP dalam memberikan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus tepat waktu. Tepat waktu dalam hal apapun, misalnya tepat waktu datang ke kantor, tepat waktu dalam meninggalkan kantor (pulang) sehingga jika ada pemohon IMB datang mereka dapat bertemu dengan pegawai pelayan IMB. Dengan ketepatan waktu yang dilakukan pegawai itu bisa memberikan penilaian positif dari masyarakat, mereka tidak akan mengeluh dan akan dengan senang hati mengurus berbagai hal untuk mengajukan IMB. Selain itu agar suatu pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, pegawai IMB harus siap dalam perubahan-perubahan sistem pekerjaan, misalnya dalam menggunakan komputer dan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan kebutuhan pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan dengan seringnya mengikuti pelatihan-pelatihan.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai dalam pembuatan IMB dapat dilihat dari kedisiplinan waktu, kemampuan, dan sikap serta kesiapan pegawai dalam melayani pemohon IMB yang datang ke kantor dengan sangat baik.

Kendala Dalam Proses Pelayanan Pembuatan IMB

Dalam suatu pelayanan, akan selalu ada kendala dan hambatan. Begitu juga dalam proses pembuatan IMB ini, ada beberapa kendala yaitu dalam pembuatan IMB SK yang dikeluarkan tidak selalu tepat waktu, hal ini dikarenakan pejabat yang bersangkutan atau kepala Dinas lagi ada urusan di luar kantor (DL), namun pegawai IMB ini selalu berusaha dengan sebaik mungkin menyelesaikan tugasnya tepat waktu, jika kepala dinas tidak berada di kantor itu bukan kesalahan dari pihak pegawai karena urusan di luar kantor itu terkadang tidak dapat diprediksi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kuantitas

Dalam kuantitas pegawai dalam pembuatan izin mendirikan bangunan dapat dilihat dari jumlah pemohon yang di selesaikan sesuai standar pelayanan pengurusan izin mendirikan bangunan yang sudah di tentukan. Pegawai dan staf dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Bengkulu dapat menyelesaikan kerja sesuai dengan yang telah ditentukan dan mencapai target yang di tentukan. target yang di maksud sebagaimana dengan jumlah pemohon yang mengajukan pengurusan izin mendirikan bangunan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

2. Kualitas

Dalam kualitas kerja pegawai dalam pembuatan izin mendirikan bangunan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Bengkulu mampu menyelesaikan semua pekerjaan yang menjadi tugas pokoknya dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar. Tidak adanya pemohon izin mendirikan bangunan mengeluh dengan kualitas pegawai dan staf dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam perizinan mendirikan bangunan serta melakukan pekerjaan dengan ramah dan penjelasan sangat mudah dipahami oleh pemohon izin mendirikan bangunan.

3. Ketepatan waktu

Dalam ketepatan waktu dapat dilihat dari pengurusan pembuatan izin mendirikan bangunan sesuai telah ditetapkan. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mampu menyelesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan tidak menunda pekerjaan yang telah diberikan dengan baik akan tetapi karena adanya kerja sama dengan dinas pekerjaan umum dan penataan tata ruang kota Bengkulu untuk survey lapangan lokasi yang diterbitkan izin mendirikan bangunan terkandung ketepatan waktu pembuatan izin mendirikan bangunan tidak sesuai dengan standar pelayanan izin mendirikan bangunan karena petugas survey lapangan tidak banyak untuk izin mendirikan bangunan kota Bengkulu dinas pekerjaan umum dan penataan tata ruang kota Bengkulu. Namun pegawai dan staf dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Bengkulu menjelaskan kepada pemohon izin mendirikan bangunan dalam proses pembuatan izin mendirikan bangunan sedikit memakan waktu dengan penjelasan baik dan benar sehingga pemohon izin mendirikan bangunan menerima dengan baik.

Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang menjadi jawaban akhir peneliti, maka beberapa saran yang di harapkan menjadi kontribusi penting yang bersangkutan sebagai berikut : Untuk menjadikan kinerja pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu yang semakin optimal, maka hendaknya diadakan penambahan sarana dan prasarana penunjang dalam pemberian IMB. Selain hal tersebut perlu dipasangnya sejumlah banner yang menjelaskan contoh yang tepat atas gambar atau sketsa bangunan yang ingin didirikan oleh pemohon tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Berkas Dan Data Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bengkulu
Cresswell Jhon W 2014, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.



Data Badan Pusat Statistik Provinsi Dan Kota

- Faisal, Sanapiah. 2007. *Format- Format Penelitian Social*, Raja GrafindoPersada; Jakarta
- Ilyas, Yaslis, 2011. *Kinerja, Terori, Penilaian Dan Pelatihan*. BPKMU-UI:Jakarta.
- Irawan, Prasetya. 2007. *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmusosial*. DIA FISIP UI; Jakarta
- Kaelan, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, Paradigma;Yogyakarta
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-UGM:Yogyakarta
- Moehiriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Raja GrafindoPersada: Jakarta.
- Moenir, A.S, 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Bumi Aksara:Jakarta
- Moleong Lexy J 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pt Remaja Rosdakarya,Bandung.
- _____2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pt Remaja Rosdakarya,Bandung.
- Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta: Yogyakarta.
- Sugiyono , *Manajemen Penelitian Administrasi*, Alfa Beta, Bandung.
- Supranto, 2006. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan, Cetakan Ketiga*. Rineka Cipta: Jakarta
- Tangkilisan, HN.S, 2005. *Manajemen Publik*. Gramedia Widiasarana Indonesia:Jakarta
- Thoha, Miftah, 2008. *Birokrasi Pemerintah Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta
- Undang- Undang Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 25 Tahun 2009Tentang Pelayanan Publik,

Analisis Pembinaan Transmigran Studi Kasus Desa Transmirasi Pelabai Kabupaten Lebong

Nour Fahrozi

Department of Administration Publik, STIA Bengkulu

Email: nuorfahrozi@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [29 Desember 2021]

Revised [19 Januari 2022]

Accepted [26 Januari 2022]

KEYWORDS

Transmigrasi,
Pembinaan,
pengawasan

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Dalam penelitian ini, aspek penelitian yang akan diteliti berdasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.22/MEN/X/2007, dan peneliti berfokus pada pembinaan di bidang ekonomi dan bidang sarana dan prasarana. Untuk mendukung aspek tersebut peneliti menggunakan teori Priyono (1996) dalam Mardikanto dan Soebianto (2017 : 170) yang menjelaskan bahwa ada 5 (lima) program strategi pembinaan yaitu : a). Pengembangan Sumberdaya Manusia; 2). Pengembangan Kelembagaan Kelompok; 3). Pemupukan Modal Masyarakat; 4). Pengembangan Usaha Produktif; 5). Penyediaan Informasi Tepat-Guna. Pada teori di atas akan memperkuat dasar peneliti dalam melakukan penelitian sesuai dengan aspek penelitian yang dipilih.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Masyarakat Desa Trans Pelabai masih sangat membutuhkan pembinaan dalam berbagai bidang demi untuk kemajuan Desa Trans Pelabai, Kondisi ekonomi masyarakat Desa Trans Pelabai masih dikatakan belum baik dikarenakan masih banyaknya keluarga yang harus mencari penghasilan tambahan di luar, Pembinaan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi sudah cukup baik, Pembinaan dalam bidang sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan sudah cukup baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

ABSTRACT

In this study, the research aspect to be investigated is based on the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number: PER.22/MEN/X/2007, and the researcher focuses on fostering in the economic sector and in the field of facilities and infrastructure. To support this aspect, the researcher uses the theory of Priyono (1996) in Mardikanto and Soebianto (2017: 170) which explains that there are 5 (five) coaching strategy programs, namely: a). Human Resource Development; 2). Group Institutional Development; 3). Community Capital Fertilization; 4). Productive Business Development; 5). Provision of Appropriate Information. The theory above will strengthen the basis of researchers in conducting research in accordance with the selected research aspects.

Based on the results of this study, the Trans Pelabai Village Community still really needs guidance in various fields for the sake of the progress of the Trans Pelabai Village, the economic condition of the Trans Pelabai Village community is still said to be not good because there are still many families who have to look for additional income outside. carried out by the Transmigration Service is good enough, Guidance in the field of health and education facilities and infrastructure is good enough to meet the needs of the community. .

PENDAHULUAN

Program bantuan bagi warga transmigran diberikan kepada warga setiap lima tahun sekali. Bentuk bantuan awal yang diberikan berupa jaminan hidup (Jadup) seperti sembako, rumah tinggal, bibit tanaman dan bibit ternak serta lahan untuk bertanam. Pemberian bantuan pertama bagi warga trasmigran terjadi pada tahun 2010, kemudian bantuan kedua pada tahun 2015 dan terakhir pada tahun 2020. Untuk bantuan pertama, bentuk bantuan yang diberikan masih berdasarkan program Pemerintah Pusat, akan tetapi pada tahun 2015 dan 2020 bentuk bantuan yang diberikan menyesuaikan dengan kebutuhan warga transmigran. Pemberiaan bantuan kepada warga transmigran merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Organisasi yang terkait yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong bekerjasama dengan UPT diberi tugas untuk melakukan pembinaan terhadap warga transmigran.

Program pemerintah untuk menjadikan kehidupan warga transmigran lebih baik sebenarnya sudah benar. Akan tetapi pemerintah tidak dapat menjamin sepenuhnya program ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil laporan tahunan 2011 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong, 90% warga transmigran tidak berhasil menjalankan program pemerintah.

Dikatakan demikian dikarenakan banyak warga yang gagal dan menyerah memanfaatkan bantuan pemerintah dengan baik. Sebagai contoh, warga yang menjadi peternak di kecamatan ini hanya beberapa keluarga yang berhasil menjadi peternak yang mengembangkan usahanya. Tidak hanya warga yang beternak, warga yang menjadi petani di sawah pun juga banyak mengalami kegagalan dan hanya sedikit yang berhasil. Faktor dari kegagalan ini salah satunya disebabkan karena kurangnya pengetahuan warga dalam beternak hewan maupun yang menjadi petani

LANDASAN TEORI

Transmigrasi

Menurut Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian. Transmigrasi adalah perpindahan pendudukan secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari Jawa yang padat penduduk nya ke Luar Jawa yang kurang padat penduduk nya, dan mempunyai berbagai tujuan, diantaranya mengurangi penduduk di Jawa, menambah pembangunan daerah - daerah yang kekurangan penduduk, pertimbangan pertimbangan strategis, usaha mempercepat proses asimilasi dan sebagainya. (Hardjosudarmo, 1965:26). Transmigrasi ialah perpindahan, dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang. (Heeren, 1979:6)

Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk yang disponsori oleh pemerintah. Kebijakan transmigrasi ditempuh pemerintah karena penyebaran penduduk di kawasan Negara ini dianggap berat sebelah, ada daerah yang terlalu padat penduduknya dan ada yang terlalu jarang, sehingga kehidupan penduduk dan perkembangan daerah beserta masyarakatnya tidak seperti yang diharapkan.

Tujuan transmigrasi tidak hanya memindahkan petani dari pulau Jawa yang terlalu padat, melainkan untuk menuju pembangunan perekonomian. Tidak hanya untuk kepentingan petani-petani dari pulau Jawa yang kekurangan tanah, juga untuk pembangunan daerah-daerah yang ditangani transmigrasi. (Prawiro, 1979:116)

Menurut Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan bahwa transmigrasi terdapat dua bentuk, yaitu transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa. Transmigrasi umum adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. Transmigrasi swakarsa dibagi dalam swakarsa berbantuan dan swakarsa mandiri. Transmigrasi swakarsa berbantuan adalah jenis transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah dan / atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan

badan usaha sebagai mitra usaha transmigrasi bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju. Sedangkan transmigrasi swakarsa mandiri adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigrasi yang bersangkutan atas arahan, layanan dan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan

Menurut Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2009 Transmigrasi adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi. Syarat untuk menjadi seorang transmigrasi sesuai dengan UU No. 29 Tahun 2009 dan PP No. 03 Tahun 2014, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk;
2. Berkeluarga yang dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga
3. Berusia produktif, yaitu usia antara 19-49 tahun sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk;
4. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
5. Memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mengembangkan kehidupan di SP yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan (pakta integritas);
6. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha dan/atau budidaya di kawasan transmigrasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan dari lembaga pelatihan yang berwenang;
7. Belum pernah bertransmigrasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian;
8. Lulus seleksi;

Sedangkan persyaratan bagi penduduk di kawasan transmigrasi yang memperoleh perlakuan sebagai transmigrasi adalah sebagai berikut :

- a. Penduduk di kawasan transmigrasi yang tinggal di Satuan Permukiman (SP) – Pugar dapat memperoleh perlakuan sebagai transmigrasi;

- b. Penduduk tersebut mencakup :
- Penduduk yang memiliki tanah dan memiliki rumah;
 - Penduduk yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki rumah; dan/atau
 - Penduduk yang tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tanah.
- c. Syarat :
- Memiliki Kartu Tanda Penduduk di permukiman yang akan dikembangkan menjadi SP-Pugar yang bersangkutan;
 - Berkeluarga;
 - Sudah tinggal menetap dan memanfaatkan tanah di permukiman paling singkat 2 tahun.

Kawasan Transmigrasi

Menurut Undang – Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian menjelaskan bahwa kawasan transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi. Kawasan transmigrasi ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pemerintah daerah. Kawasan transmigrasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi atau kawasan strategis kabupaten / kota. Penetapan kawasan strategis dan penyusunan rencana tata ruangnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan transmigrasi dibangun dan dikembangkan di Kawasan Perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan

Pembinaan Transmigrasi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pembinaan adalah suatu proses, peraturan, cara membina dan sebagainya atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan menurut Mangunhajana (1991:12) Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hak-hak yang sudah dimiliki dan dipelajari hal-hal yang baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sudah dijalani secara lebih efektif.

Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi” mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa :

1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik
2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (*change*).
3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.
4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti. (Miftah, 1997:16-17).

Fungsi Pembinaan

Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya pegawai-pegawai yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin dan sadar akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang- undangan kepegawaian yang berlaku, fungsi pembinaan diarahkan untuk :

- a. Memupuk kesetiaan dan ketaatan.
- b. Meningkatkan adanya rasa pengabdian rasa tanggung jawab, kesungguhan dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal.
- d. Mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa.
- e. Memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi (wadah yang ditentukan).

Karakteristik Pembinaan

Menurut French dan Bell yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya Pembinaan Organisasi mengidentifikasi karakteristik pembinaan, yaitu :

- a. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi yang substantif.
- b. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku.
- c. Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim.
- d. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan
- e. Mempergunakan model "action research".
- f. Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator.
- g. Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung
- h. Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial.

Dengan memahami karakteristik diatas, membedakan setiap pengembangan atau pembinaan yang dapat dijadikan suatu ukuran yang dapat membedakan antara pembinaan dengan usaha-usaha pembaharuan dan pembinaan perubahan, lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut Mas'ood (1990) dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:26) adalah upaya memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Imran (2008 : 30) adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional.

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2008:80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, meliputi mandiri berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. dengan baik hasil pelayanan (service outcome) sebelum pelayanan di konsumsi.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Priyono (1996) dalam Mardikanto dan Soebianto (2017 : 170) yang menjelaskan bahwa ada 5 (lima) program strategi pembinaan yaitu : a) Pengembangan Sumberdaya Manusia; 2) Pengembangan Kelembagaan Kelompok; 3) Pemupukan Modal Masyarakat; 4) Pengembangan Usaha Produktif; 5) Penyediaan Informasi Tepat-Guna.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Ditinjau dari jenis data penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan menurut Sugiyono (2016:9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk melihat langsung kondisi obyek penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung ke Desa Trans Pelabai yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. Peneliti akan melihat bagaimana kondisi masyarakat transmigran yang ada di Desa Trans Pelabai. Peneliti ingin melihat kondisi ekonomi, sosial budaya serta sarana dan prasarana yang ada di desa tersebut. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada para transmigran yang ada di Desa Trans Pelabai.

Peneliti tidak hanya mengamati kondisi masyarakat transmigran yang ada di Desa Trans Pelabai, tetapi peneliti juga melakukan interaksi seperti wawancara bertanya langsung kepada masyarakat tentang kehidupan transmigran yang ada di desa tersebut. Hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan langsung gambaran kondisi yang terjadi di lapangan. Peneliti tidak hanya mencari informasi maupun data melalui dokumen, akan tetapi langsung dari sumber informasi masyarakat sekitar

Aspek Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:32) menjelaskan bahwa fokus penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga penelitian kualitatif menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku dan aktifitas yang

berinteraksi secara sinergis.

Dalam penelitian ini, aspek penelitian yang akan diteliti berdasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.22/MEN/X/2007, dan peneliti berfokus pada pembinaan di bidang ekonomi dan bidang sarana dan prasarana. Untuk mendukung aspek tersebut peneliti menggunakan teori Priyono (1996) dalam Mardikanto dan Soebianto (2017 : 170) yang menjelaskan bahwa ada 5 (lima) program strategi pembinaan yaitu : a). Pengembangan Sumberdaya Manusia; 2). Pengembangan Kelembagaan Kelompok; 3). Pemupukan Modal Masyarakat; 4). Pengembangan Usaha Produktif; 5). Penyediaan Informasi Tepat-Guna. Pada teori di atas akan memperkuat dasar peneliti dalam melakukan penelitian sesuai dengan aspek penelitian yang dipilih.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk dijadikan lokasi penelitian adalah Desa Trans Pelabai, Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong. Desa ini merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pelabai yang warga masyarakatnya adalah transmigran. Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862). Subjek penelitian dalam penelitian adalah warga masyarakat serta pembina transmigran yang mengelola Organisasi UPT yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Kabupaten Lebong.

Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:59) menjelaskan bahwa yang menjadi instrumen penelitian dalam jenis penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti harus memahami metode penelitian kualitatif, menguasai teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta memiliki kesiapan untuk memasuki lapangan. Ciri khas dari penelitian kualitatif adalah tidak dapat dipisahkan dari pengamatan, dimana pengamat memungkinkan melihat dan mengamati sendiri situasi yang mungkin terjadi.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:63) menjelaskan bahwa secara umum terdapat 4 macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi yaitu menggabungkan 3 teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi).

1. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2010:194) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

3. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72) metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perseorangan. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti dan juga arsip dokumen mengenai aturan-aturan pemerintah daerah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (data reduction), data display, dan conclusion drawing/ verification (Sugiyono, 2011).

1. Reduksi data dalam penelitian ini adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Dalam reduksi data peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh peneliti.

2. Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dimaksudkan untuk

menggabungkan dan menyederhanakan sejumlah informasi agar memudahkan peneliti dalam penarikan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan dengan meninjau ulang catatan atau data yang diperoleh sehingga memudahkan dalam mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Pelabai ada sejak tahun 2009 yang terletak di Desa Pelabai Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Transmigrasi Pelabai ini penduduknya berasal dari Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tangerang yang di datangkan dua kali kedatangan, kedatangan awal pada bulan Desember 2009 dan kedatangan yang kedua januari 2010. Adapun jumlah rumah tinggal di wilayah transmigrasi pelabai ini berjumlah 200 rumah, yang dihuni oleh 50 persen warga lokal dan 50 persen warga pendatang dari Cianjur dan Tangerang.

Sejak tahun 2018 transmigrasi Pelabai ini telah habis masa binaan dari dinas Transmigrasi Kabupaten Lebong dan diserahkan terimakan ke Pemerintahan Desa terdekat yaitu Desa Pelabai Kecamatan Pelabai. Jadi sejak itu UPT Pelabai berada di bawah pemerintahan desa pelabai. Adapun aset yang berada di UPT Pelabai di kelola oleh Desa Pelabai antara lain:

1. Tempat ibadah (Masjid Nurul Hikmah)
2. Gedung Sekolah SD (SDN 87 Lebong)
3. Rumah Dinas Guru (2 unit)
4. Rumah Dinas UPT (1 unit)
5. Rumah dinas Tenaga Kesehatan (1 unit)
6. Gedung Pos Kesehatan
7. Kantor UPT
8. Balai Pertemuan
9. Gudang

Adapun jumlah penduduk transmigrasi Pelabai saat ini lebih kurang 190 kepala keluarga, dengan jumlah jiwa 688 jiwa yang menempati rumah transmigrasi sekitar 187 rumah sisanya rumah kosong yang tidak di tempati oleh pemiliknya sekitar 13 rumah. Ada juga rumah – rumah baru yang di bangun di pemukiman UPT pelabai yang semakin bertambah jumlah penduduknya setiap tahun

Pembahasan

Pembinaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi

Pembinaan dalam bidang ekonomi dilakukan dengan berbagai metode pembinaan. Pembinaan di bidang ekonomi berfokus pada upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Trans Pelabai. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada pembinaan dalam hal pemberdayaan UMKM dan juga pemberian pelatihan dan pembinaan dalam bidang pertanian.

1. Pemberdayaan UMKM

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan, didapatkan hasil dalam hal pemberdayaan UMKM bagi masyarakat transmigran di Desa Trans Pelabai belum sesuai dengan target yang diharapkan. Menurut Kepala Bagian Transmigrasi Kabupaten Lebong menyatakan bahwa:

“Program UMKM merupakan salah satu program untuk meningkatkan ekonomi masyarakat transmigran Desa Trans Pelabai. Pada awalnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat transmigran biasanya hanya berfokus pada bidang pertanian dan perkebunan. Akan tetapi, sekarang ini program UMKM menjadi program tambahan bagi masyarakat transmigran. Diharapkan dengan adanya program pembinaan UMKM, para ibu – ibu juga dapat membantu ekonomi keluarga melalui UMKM”

2. Pembinaan Masyarakat dalam Bidang Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah hal yang terpisahkan dalam suatu lingkungan masyarakat. Karena sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang harus tersedia dalam lingkungan masyarakat. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam suatu lingkungan sangatlah banyak seperti, akses jalan, sanitasi air, MCK, kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial dan listrik. Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada sarana dan prasarana bidang kesehatan dan pendidikan

3. Pembinaan di Bidang Sarana dan Prasarana Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan, didapatkan hasil dalam hal pembinaan bagi masyarakat transmigran di Desa Trans Pelabai dalam bidang pembangunan sarana dan prasana kesehatan belum sesuai dengan target yang diharapkan. Menurut Kepala Bagian Transmigrasi Kabupaten Lebong menyatakan bahwa:

4. Pembinaan dalam Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan

5. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan, didapatkan hasil dalam hal pemberdayaan untuk pendirian Sekolah Dasar bagi anak – anak transmigran di Desa Trans Pelabai sudah sesuai dengan target yang diharapkan meskipun baru sekolah dasar. Menurut Kepala Bagian Transmigrasi Kabupaten Lebong menyatakan bahwa :
 “Dinas Transmigrasi sudah merencanakan untuk mendirikan fasilitas sekolah di Desa Trans Pelabai. Karena menurut saya fasilitas pendidikan memang sangat dibutuhkan di Desa Trans Pelabai agar anak – anak dapat belajar tidak harus menempuh jarak yang jauh untuk menuju ke sekolah. Karena selama ini, anak – anak yang ada di Desa Trans Pelabai pada sekolah di luar Desa Trans Pelabai.”
6. Pemberdayaan Warga Trans Pelabai Dalam Bidang UMKM
 UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara. (Tambunan, 2011)
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di Desa Trans Pelabai hanya terdapat 1 UMKM yang masih produktif yakni usaha budidaya jamur tiram dan kripik jamur tiram. UMKM ini adalah satu – satunya yang masih bertahan hingga saat ini.
7. Pembinaan Masyarakat Transmigran dalam Bidang Sarana dan Prasarana
 Sarana dan prasarana merupakan suatu kesatuan yang saling terhubung, karena keduanya sama-sama unsur penting yang diperlukan di dalam masyarakat. Sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007 : 999) adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek dan sebagainya). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana adalah suatu alat untuk menunjang terlaksananya suatu proses atau program.
 Sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat beragam, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sosial serta sarana dan prasarana umum seperti jalan, penerangan, sanitasi air dan MCK. Sebagai gambaran umum bahwa di Desa Trans Pelabai telah memiliki beberapa sarana dan prasarana seperti sekolah, puskesmas, sanitasi air dan akses jalan.
8. Pembinaan Masyarakat Transmigran dalam Bidang Sarana dan Prasarana Kesehatan
 Sarana dan prasarana kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Kemudahan akses untuk menuju lokasi sarana dan prasarana kesehatan menjadi satu hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan pada suatu daerah menjadi tanggungjawab pemerintah, hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 17 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. (UU Kesehatan, 2013:8)
 Desa Trans Pelabai pada awal sebelum adanya warga transmigran merupakan kawasan yang termasuk dalam Desa Pelabai. Akan tetapi kawasan yang sekarang menjadi Desa Trans Pelabai adalah kawasan hutan dan tanah kosong milik negara sebelumnya. Oleh karena itu Desa Trans Pelabai memang merupakan desa baru yang masih belum memiliki sarana dan prasarana pendukung bagi kehidupan masyarakat pada awalnya. Sehingga pembangunan beberapa sarana dan prasarana di Desa Trans Pelabai sangat dibutuhkan, salah satunya adalah sarana dan prasarana kesehatan.
9. Pembinaan Masyarakat Desa Trans Pelabai Sarana dan Prasarana Pendidikan
 Pendidikan yang ada pada awalnya di Desa Trans Pelabai hanya berupa pendidikan informal dan non formal. Pendidikan hanya berasal dari orangtua, saudara dan lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini dikarenakan belum tersedianya fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP maupun SMA. Bagi Desa Trans Pelabai, minimal memiliki sebuah sekolah TK dan Sekolah Dasar mungkin jauh lebih baik dibandingkan dengan tidak memiliki sama sekali. Karena anak-anak yang ada di Desa Trans Pelabai juga membutuhkan pendidikan formal melalui jalur pendidikan dasar hingga menengah atas.
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, di Desa Trans Pelabai telah memiliki sebuah Sekolah Dasar dengan bangunan sendiri. Sekolah Dasar yang ada di Desa Trans Pelabai adalah SD Negeri 87 Lebong. Sekolah Dasar ini berdiri atas kerjasama Dinas Transmigrasi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong untuk dapat memberikan pendidikan yang layak di Desa Trans Pelabai

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Masyarakat Desa Trans Pelabai masih sangat membutuhkan pembinaan dalam berbagai bidang demi untuk kemajuan Desa Trans Pelabai;
2. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Trans Pelabai masih dikatakan belum baik dikarenakan masih banyaknya keluarga yang harus mencari penghasilan tambahan di luar;
3. Pembinaan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi sudah cukup baik;
4. Pembinaan dalam bidang sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan sudah cukup baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Saran

1. Perlu diprogramkan kembali pembinaan dalam berbagai bidang tidak hanya bidang ekonomi dan sarana prasarana;
2. Pembinaan dalam bidang UMKM perlu dilaksanakan kembali dan menjadi agenda rutin;
3. Sarana dan prasarana di Desa Trans Pelabai perlu ditingkatkan kembali terutama dalam hal akses jalan dan juga air bersih;
4. Sarana air bersih perlu dilakukan renovasi agar terlihat lebih layak untuk digunakan;
5. Perlu dibangunnya pagar pembatas pada bangunan sekolah dan puskesmas yang ada di Desa Trans Pelabai;
6. Dukungan terhadap peningkatkan fasilitas yang ada di puskesmas dan sekolahan juga perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardjosudarmo.S. (1965). *Kebidjaksanaan Transmigrasi Dalam Rangka Pembangunan Masjarakat Desa Di Indonesia*. Djakarta: Bhratara.
- H.J. Heeren. 1979. *Transmigrasi Di Indonesia : Hubungan Transmigran Dan Penduduk Asli, Dengan Titik Berat Sumatera Selatan Dan Tengah*. Gramedia : Jakarta
- Keputusan Bupati Lebong Nomor 527 Tahun 2006 Tentang Penetapan/Pencadangan Tanah Lokasi Permukiman Transmigrasi di Desa Pelabai Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong
- Keputusan Bupati Lebong Nomor 228 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Identifikasi Calon Lokasi Permukiman Transmigrasi Kabupaten Lebong.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ri Nomor PER.22/MEN/IX/2007 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pemukiman Transmigrasi.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA Sugiyono. Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tri Ubaya Sakti dikutip oleh Musanef dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*.
- Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi.
- Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahn 1997 tentang Ketransmigrasian.
- Undang–Undang RI Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang.